

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



MATA KULIAH	:	Pemerintahan Daerah
KODE MK	:	3KKBP214
SEMESTER	:	3

Tim Penyusun:

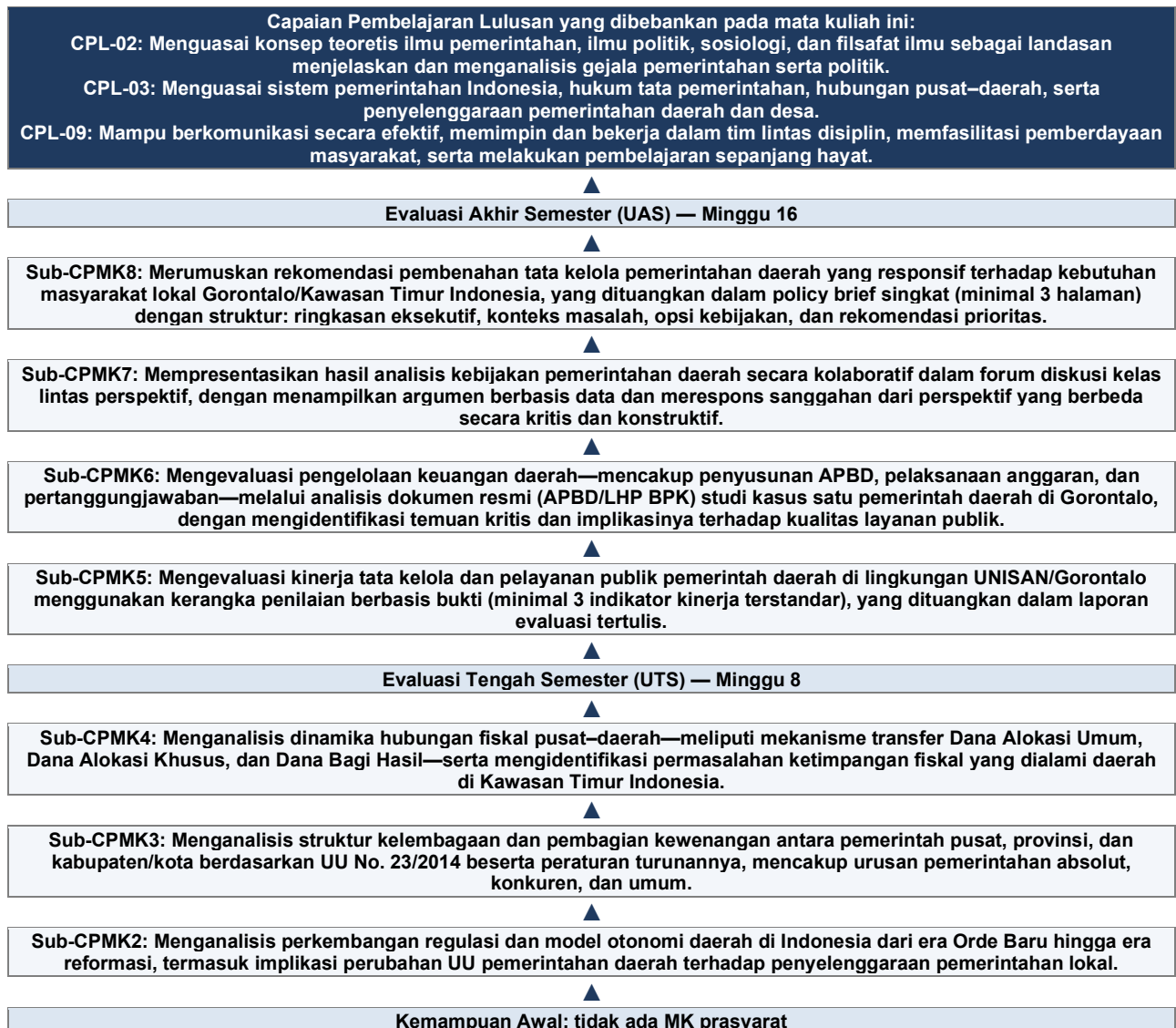
Dr. Sandi Prahara, S.T., M.Si.

(Program Studi Ilmu Pemerintahan — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo)

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

1. Analisis Pembelajaran

Diagram berikut menggambarkan keterkaitan konstruktif (constructive alignment) dari kemampuan awal, melalui Sub-CPMK secara berjenjang dan asesmen (UTS/UAS), hingga pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini.



2. Rencana Pembelajaran Semester

		UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1				Kode Dokumen RPS-3KKBP214	
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER							
MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Pemerintahan Daerah		3KKBP214	MKWP	T=3	P=0	3	31 Mei 2023
OTORISASI		Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua PRODI		
		 Dr. Sandi Prahara, S.T., M.Si. NIDN. 0929038602	 Dr. Sandi Prahara, S.T., M.Si. NIDN. 0929038602		 Purwanto, S.IP., M.Si. NIDN. 0926096601		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL-02	Menguasai konsep teoretis ilmu pemerintahan, ilmu politik, sosiologi, dan filsafat ilmu sebagai landasan menjelaskan dan menganalisis gejala pemerintahan serta politik.					
	CPL-03	Menguasai sistem pemerintahan Indonesia, hukum tata pemerintahan, hubungan pusat–daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.					
	CPL-09	Mampu berkomunikasi secara efektif, memimpin dan bekerja dalam tim lintas disiplin, memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, serta melakukan pembelajaran sepanjang hayat.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori, dan landasan filosofis pemerintahan daerah—mencakup desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta otonomi daerah—sebagai kerangka analitis memahami penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.					
	CPMK2	Mahasiswa mampu menganalisis struktur, kewenangan, dan dinamika hubungan pusat–daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan regulasi yang berlaku (UU No. 23/2014 dan peraturan turunannya), termasuk mengidentifikasi permasalahan fiskal daerah dan potensi konflik kewenangan di Kawasan Timur Indonesia.					
	CPMK3	Mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah—meliputi tata kelola, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah—melalui studi kasus nyata pemerintah daerah di lingkungan UNISAN/Gorontalo, dengan menghasilkan laporan evaluasi tertulis yang memuat temuan, kriteria penilaian, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.					

	CPMK4	Mahasiswa mampu mempresentasikan dan mendiskusikan secara kolaboratif hasil analisis kebijakan pemerintahan daerah dalam forum kelas lintas perspektif, serta merumuskan rekomendasi pembenahan tata kelola pemerintahan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, yang dituangkan dalam policy brief singkat (minimal 3 halaman).			
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)				
	Sub-CPMK1	Menjelaskan konsep desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta membandingkan landasan filosofis otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan minimal 3 perspektif teoritis.			
	Sub-CPMK2	Menganalisis perkembangan regulasi dan model otonomi daerah di Indonesia dari era Orde Baru hingga era reformasi, termasuk implikasi perubahan UU pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan lokal.			
	Sub-CPMK3	Menganalisis struktur kelembagaan dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan UU No. 23/2014 beserta peraturan turunannya, mencakup urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum.			
	Sub-CPMK4	Menganalisis dinamika hubungan fiskal pusat–daerah—meliputi mekanisme transfer Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil—serta mengidentifikasi permasalahan ketimpangan fiskal yang dialami daerah di Kawasan Timur Indonesia.			
	Sub-CPMK5	Mengevaluasi kinerja tata kelola dan pelayanan publik pemerintah daerah di lingkungan UNISAN/Gorontalo menggunakan kerangka penilaian berbasis bukti (minimal 3 indikator kinerja terstandar), yang dituangkan dalam laporan evaluasi tertulis.			
	Sub-CPMK6	Mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah—mencakup penyusunan APBD, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban—melalui analisis dokumen resmi (APBD/LHP BPK) studi kasus satu pemerintah daerah di Gorontalo, dengan mengidentifikasi temuan kritis dan implikasinya terhadap kualitas layanan publik.			
	Sub-CPMK7	Mempresentasikan hasil analisis kebijakan pemerintahan daerah secara kolaboratif dalam forum diskusi kelas lintas perspektif, dengan menampilkan argumen berbasis data dan merespons sanggahan dari perspektif yang berbeda secara kritis dan konstruktif.			
	Sub-CPMK8	Merumuskan rekomendasi pembenahan tata kelola pemerintahan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal Gorontalo/Kawasan Timur Indonesia, yang dituangkan dalam policy brief singkat (minimal 3 halaman) dengan struktur: ringkasan eksekutif, konteks masalah, opsi kebijakan, dan rekomendasi prioritas.			
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK				
		CPMK1	CPMK2	CPMK3	CPMK4
	Sub-CPMK1	√	—	—	—
	Sub-CPMK2	√	—	—	—
	Sub-CPMK3	—	√	—	—
	Sub-CPMK4	—	√	—	—
	Sub-CPMK5	—	—	√	—
	Sub-CPMK6	—	—	√	—
	Sub-CPMK7	—	—	—	√
	Sub-CPMK8	—	—	—	√
	Jumlah	2	2	2	2

	Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK																																																												
	<table><tr><td></td><td>CPL-02 (%)</td><td>CPL-03 (%)</td><td>CPL-09 (%)</td><td>Bobot penilaian (%)</td><td>Jumlah Minggu</td></tr><tr><td>Sub-CPMK1</td><td>8</td><td>7</td><td></td><td>15</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK2</td><td>8</td><td>7</td><td></td><td>15</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK3</td><td>7</td><td>7</td><td></td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK4</td><td>4</td><td>3</td><td></td><td>7</td><td>1</td></tr><tr><td>Sub-CPMK5</td><td></td><td>14</td><td></td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK6</td><td></td><td>14</td><td></td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK7</td><td></td><td></td><td>14</td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK8</td><td></td><td></td><td>7</td><td>7</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>27</td><td>52</td><td>21</td><td>100</td><td>14</td></tr></table>		CPL-02 (%)	CPL-03 (%)	CPL-09 (%)	Bobot penilaian (%)	Jumlah Minggu	Sub-CPMK1	8	7		15	2	Sub-CPMK2	8	7		15	2	Sub-CPMK3	7	7		14	2	Sub-CPMK4	4	3		7	1	Sub-CPMK5		14		14	2	Sub-CPMK6		14		14	2	Sub-CPMK7			14	14	2	Sub-CPMK8			7	7	1		27	52	21	100	14
	CPL-02 (%)	CPL-03 (%)	CPL-09 (%)	Bobot penilaian (%)	Jumlah Minggu																																																								
Sub-CPMK1	8	7		15	2																																																								
Sub-CPMK2	8	7		15	2																																																								
Sub-CPMK3	7	7		14	2																																																								
Sub-CPMK4	4	3		7	1																																																								
Sub-CPMK5		14		14	2																																																								
Sub-CPMK6		14		14	2																																																								
Sub-CPMK7			14	14	2																																																								
Sub-CPMK8			7	7	1																																																								
	27	52	21	100	14																																																								
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Pemerintahan Daerah (3 SKS) mengkaji konsep, teori, dan landasan filosofis desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta otonomi daerah sebagai kerangka analitis memahami penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dengan bertumpu pada Bahan Kajian Teori dan Sistem Pemerintahan serta Pemerintahan Daerah, Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat. Mata kuliah ini menempati posisi inti dalam kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan UNISAN karena menjadi jembatan antara penguasaan teori pemerintahan (CPL-02) dan pemahaman sistemik hubungan pusat–daerah berdasarkan UU No. 23/2014 beserta peraturan turunannya (CPL-03), sekaligus melatih kemampuan komunikasi dan kerja tim lintas perspektif dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan (CPL-09). Melalui pendekatan Case-Based Learning dan Project-Based Learning, mahasiswa secara progresif bergerak dari penjelasan konsep dan analisis struktur kewenangan hingga evaluasi kinerja tata kelola, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah—dengan merujuk pada kasus nyata pemerintah daerah di lingkungan Gorontalo dan Kawasan Timur Indonesia sebagai laboratorium kontekstual. Capaian akhir mata kuliah ini adalah kemampuan mahasiswa merumuskan rekomendasi pembenahan tata kelola pemerintahan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, yang dituangkan dalam laporan evaluasi tertulis berisi temuan dan rekomendasi berbasis bukti serta policy brief singkat minimal 3 halaman, mencerminkan nilai integritas akademik dan semangat pengabdian kepada masyarakat sesuai nilai-nilai ICHSA-N.																																																												
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Konsep dasar pemerintahan daerah; 2. Desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan; 3. Landasan filosofis otonomi daerah; 4. Kerangka regulasi UU No. 23/2014; 5. Struktur & kewenangan pemerintah daerah; 6. Hubungan pusat–daerah & konflik kewenangan;																																																												

	7. Fiskal daerah & sumber pendapatan daerah; 8. Tata kelola & pelayanan publik daerah; 9. Pengelolaan keuangan daerah; 10. Pemerintahan desa & pemberdayaan masyarakat; 11. Evaluasi kinerja pemerintah daerah; 12. Rekomendasi kebijakan tata kelola daerah.
Pustaka	Utama : (1) Pustaka Utama; (2) Aziz, A., & Arnold, D. (2020). Decentralization and Local Government in Indonesia. Routledge; (3) Hooker, M. B. (2016). Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law. ISEAS Publishing; (4) Rondinelli, D. A. (1999). Decentralization, Territorial Power and the State: A Critical Response. Development and Change, 30(4), 881-918; (5) Seymour, R., & Turner, S. (2002). Otonomi Daerah: Indonesia's Decentralisation Experiment. New Zealand Journal of Asian Studies, 4(2), 33-51; (6) Shah, A. (Ed.). (2006). Local Governance in Developing Countries. World Bank; (7) Syafrudin, A. (2006). Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika. Pendukung :
	(1) Pustaka Pendukung; (2) Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Negara; (3) Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara; (4) Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Jakarta: Sekretariat Negara; (5) Hijri, Ulum. 2016. "Problematisasi Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 19(3): 211-224; (6) Kaho, Josef Riwu. 2010. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. Jakarta: Rajawali Pers.
Dosen Pengampu	Dr. Sandi Prahara, S.T., M.Si.
Modalitas dan Matakuliah prasyarat	Modalitas: - Mata kuliah prasyarat: -

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,2	Sub-CPMK1: Menjelaskan konsep desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta membandingkan landasan filosofis otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan minimal 3 perspektif teoritis.	Mahasiswa mampu: - Menjelaskan pengertian desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan secara definitif berdasarkan minimal dua sumber teoretis yang berbeda - Membedakan karakteristik desentralisasi politik, administratif, dan fiskal menggunakan skema tipologi yang tepat - Mengidentifikasi landasan filosofis otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia dari perspektif teoritis Rondinelli, Syafrudin, dan Aziz & Arnold - Menjelaskan hubungan konseptual	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis identifikasi konsep: mahasiswa mengklasifikasikan 5 ilustrasi kasus singkat ke dalam kategori desentralisasi, dekonsentrasi, atau tugas pembantuan; dinilai berdasarkan ketepatan klasifikasi dan kelengkapan alasan (rubrik 4 level) Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan bertanya dan merespons dalam diskusi pengantar; argumen	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi dengan tinjauan singkat (10 menit) atas pra-analisis mahasiswa, dilanjutkan paparan konsep inti menggunakan LCD proyektor; sesi kedua diisi diskusi kelompok kecil (3-4 orang) membahas perbedaan konseptual ketiga mekanisme pelimpahan kewenangan (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara singkat (3 menit per kelompok) di hadapan kelas; dosen memberikan umpan balik langsung dan meluruskan miskonsepsi; sesi ditutup dengan sintesis dosen	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video kuliah pengantar (durasi 20-30 menit) yang menjelaskan tipologi desentralisasi dan landasan filosofis otonomi daerah ke LMS UNISAN, disertai slide ringkasan dan tautan dokumen regulasi dari JDIH (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses dan menonton video, mengunduh slide, lalu membaca bagian terpilih dari Rondinelli (1999) dan Syafrudin (2006) yang telah ditautkan dosen sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran:	Bahan Kajian: - Konsep dasar pemerintahan daerah; - Desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan; - Landasan filosofis otonomi daerah; Pustaka: Rondinelli (1999); Syafrudin (2006); Aziz & Arnold (2020); Seymour & Turner (2002); Republik Indonesia (UU No. 23 Tahun 2014).	15

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		antara desentralisasi dan penguatan pemerintahan lokal dalam konteks negara kesatuan • Menyampaikan argumen akademis secara lisan dengan mengutip sumber yang valid dan dapat diverifikasi (nilai Integrity ICHSA-N)	didukung referensi, bukan opini semata; menghargai pandangan rekan (nilai Harmony ICHSA-N) Tugas: Ringkasan konseptual tertulis: tabel perbandingan tiga konsep (desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan) dan tiga perspektif teoritis otonomi daerah; maksimal 2 halaman A4, dikumpulkan di LMS UNISAN	MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: tiap kelompok menganalisis satu ilustrasi kasus nyata (misalnya pelimpahan urusan kesehatan ke kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo) untuk membedakan mana yang termasuk desentralisasi, dekonsentrasi, atau tugas pembantuan berdasarkan ketentuan UU No. 23/2014 Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara mandiri menyusun tabel perbandingan tiga konsep (desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan) yang dilengkapi kolom: definisi menurut minimal dua sumber pustaka, karakteristik utama, contoh konkret dari konteks pemerintahan daerah di	Case-Based Learning: mahasiswa membaca dua ringkasan kasus singkat tentang praktik desentralisasi di daerah otonom Indonesia yang diunggah dosen, kemudian menuliskan pra-analisis awal berupa identifikasi jenis desentralisasi yang diterapkan di LMS UNISAN Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Indonesia, dan landasan regulasi. Di bagian bawah tabel, mahasiswa menambahkan paragraf ringkas (maks. 150 kata) yang menjelaskan salah satu perspektif teoritis otonomi daerah yang paling relevan menurut mereka untuk konteks Kawasan Timur Indonesia, disertai alasan berbasis argumen akademis, bukan opini belaka Deliverable: Tabel perbandingan tiga konsep beserta paragraf argumentatif; format dokumen Word/Google Docs; maksimal 2 halaman A4; diunggah ke LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan minggu ke-2; wajib menyertakan pernyataan penggunaan AI (jika digunakan) sesuai Pedoman AI Generatif UNISAN			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tes tulis singkat (15 menit): uraian perbandingan dua perspektif teoritis yang dipilih mahasiswa; dinilai berdasarkan kejelasan argumen, ketepatan penggunaan konsep, dan kelengkapan kutipan sumber (rubrik 4 level: sangat baik, baik, cukup, kurang) Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi substantif dalam diskusi panel kelas; mahasiswa dinilai	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi diskusi panel: tiap kelompok mempresentasikan satu perspektif teoritis yang ditugaskan, kelompok lain merespons secara kritis; dosen merangkum dan memetakan titik temu serta perbedaan antar-perspektif di papan tulis (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa menggunakan matriks perbandingan yang disusun bersama kelompok sebagai acuan presentasi dan respons; dosen memberikan umpan balik terstruktur berdasarkan rubrik yang telah dibagikan sebelumnya MP — Metode Pembelajaran:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah bahan bacaan terpilih (potongan dari Rondinelli 1999 dan Aziz & Arnold 2020) beserta panduan pertanyaan pemandu analisis ke LMS UNISAN; dosen membuka forum diskusi daring untuk mahasiswa mengajukan pra-argumen sebelum sesi luring (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa membaca bahan yang ditetapkan dosen, merespons minimal satu pertanyaan pemandu di forum diskusi LMS UNISAN, dan menyiapkan posisi awal (pro atau kritis) terhadap salah satu perspektif teoritis sebagai bekal debat kelas	Bahan Kajian: • Desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan; • Landasan filosofis otonomi daerah; Pustaka: Rondinelli (1999); Aziz & Arnold (2020); Seymour & Turner (2002); Shah (2006); Syafrudin (2006).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			berdasarkan kemampuan mempertahankan posisi teoritis dengan argumentasi berbasis pustaka, bukan sekadar menyampaikan ulang definisi Tugas: Matriks perbandingan tiga perspektif teoritis otonomi daerah (kelompok 3-4 orang): kolom berisi nama perspektif, tokoh/sumber utama, asumsi dasar, implikasi terhadap model desentralisasi, dan contoh penerapan di Indonesia; maksimal 3 halaman A4 dikumpulkan di LMS UNISAN	Case-Based Learning: panel debat berbasis kasus -- tiap kelompok mempertahankan relevansi perspektif teoritis yang dipegang untuk menjelaskan konteks otonomi daerah di Gorontalo sebagai bagian dari Kawasan Timur Indonesia, mendorong kreativitas argumentasi (nilai Creativity ICHSA-N) Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok (3-4 orang) menyusun matriks perbandingan tiga perspektif teoritis otonomi daerah. Matriks memuat kolom: nama perspektif, tokoh atau sumber utama, asumsi dasar tentang hubungan pusat-daerah, implikasi terhadap model desentralisasi yang dipilih, dan satu contoh penerapan konkret di Indonesia. Di	MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa mengidentifikasi perspektif teoritis yang mendasari kebijakan desentralisasi pada kasus yang telah dianalisis minggu sebelumnya, lalu mempersiapkan argumen untuk diperdebatkan di kelas Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				baris terakhir matriks, kelompok menambahkan baris sintesis yang merumuskan perspektif mana yang paling applicable untuk konteks pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia beserta justifikasi singkat. Tugas merupakan lanjutan dan pendalaman dari tabel perbandingan individual minggu ke-1 Deliverable: Matriks perbandingan tiga perspektif teoritis dalam format tabel (Word/Google Docs); dilengkapi baris sintesis dan daftar pustaka; maksimal 3 halaman A4; diunggah ke LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan minggu ke-3; wajib menyertakan pernyataan kontribusi anggota dan pernyataan penggunaan AI jika digunakan			
3,4	Sub-CPMK2: Menganalisis perkembangan regulasi dan	Mahasiswa mampu:	Bentuk Penilaian	BP — Mekanisme kuliah:	BP — Mekanisme kuliah:	Bahan Kajian:	15

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	model otonomi daerah di Indonesia dari era Orde Baru hingga era reformasi, termasuk implikasi perubahan UU pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan lokal.	• Menganalisis perubahan mendasar kerangka regulasi pemerintahan daerah dari era Orde Baru (UU No. 5/1974) hingga era reformasi (UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, UU No. 23/2014) menggunakan kerangka komparatif historis • Mengidentifikasi faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial yang mendorong perubahan regulasi otonomi daerah pada setiap fase • Menjelaskan implikasi substansial perubahan UU No. 23/2014 terhadap pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota • Menggunakan data dan dokumen regulasi	Tes/Unjuk Kerja: Kuis analisis regulasi: mahasiswa menyajikan tabel kronologi perubahan regulasi pemerintahan daerah (minimal 4 fase) dengan kolom substansi perubahan dan implikasi utama; dinilai berdasarkan akurasi historis, kedalaman analisis, dan ketepatan referensi regulasi (rubrik 4 level) Partisipasi kelas & laboratorium: Kualitas analisis yang disampaikan dalam diskusi berbasis dokumen	Dosen memaparkan kerangka kronologis perubahan regulasi (20 menit) menggunakan LCD proyektor; dilanjutkan sesi analisis dokumen terpandu: mahasiswa dalam kelompok membandingkan ketentuan spesifik dalam dua era regulasi menggunakan tabel analisis yang disiapkan dosen (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Tiap kelompok mempresentasikan hasil analisis dokumen (5 menit per kelompok); kelas mendiskusikan implikasi perubahan regulasi terhadap kapasitas pemerintah daerah di Gorontalo; dosen menyintesis dan mengarahkan pada signifikansi implikasi UU No. 23/2014	Dosen mengunggah timeline interaktif perkembangan regulasi pemerintahan daerah (dalam format slide atau infografis PDF) ke LMS UNISAN beserta tautan dokumen regulasi melalui JDIH; dosen memberikan panduan analisis dokumen regulasi yang memuat instruksi cara membaca perbandingan ketentuan antar-undang-undang (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses dan menelaah minimal dua dokumen regulasi (misalnya lampiran pembagian urusan UU No. 23/2014 dan penjelasannya dari JDIH), kemudian mengunggah catatan analisis awal (bukan draft tugas) berupa poin-poin perbedaan	• Kerangka regulasi UU No. 23/2014; • Desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan; Pustaka: Aziz & Arnold (2020); Seymour & Turner (2002); Hijri (2016); Kaho (2010); Republik Indonesia (UU No. 23 Tahun 2014).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		resmi dari JDIH sebagai sumber utama analisis (nilai Integrity ICHSA-N) • Mengaitkan dinamika regulasi nasional dengan tantangan implementasi di daerah-daerah dengan kapasitas administratif terbatas seperti di Kawasan Timur Indonesia (nilai Nationalism ICHSA-N)	regulasi; mahasiswa dinilai berdasarkan kemampuan menghubungkan teks regulasi dengan konteks politik-historis yang melatarbelakangi ya, bukan sekadar membacakan pasal Tugas: Makalah analisis individual: perbandingan dua era regulasi otonomi daerah (pilih satu: era UU No. 22/1999 vs. UU No. 32/2004, atau era UU No. 32/2004 vs. UU No. 23/2014); 3-4 halaman A4, dikumpulkan di LMS UNISAN	MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning berbasis dokumen regulasi: kelompok menganalisis kasus konkret perubahan pembagian urusan bidang tertentu (misalnya pendidikan menengah atau kelautan) antara kabupaten/kota dan provinsi pasca-UU No. 23/2014, kemudian mendiskusikan implikasinya terhadap pelayanan publik di daerah Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individual menyusun makalah analisis yang membandingkan dua era regulasi otonomi daerah yang dipilih dari pasangan berikut: (a) UU No. 22/1999 versus UU No. 32/2004, atau (b) UU No. 32/2004 versus UU No.	substansial yang mereka temukan ke forum LMS UNISAN sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menganalisis dokumen pembagian urusan konkuren dalam UU No. 23/2014 untuk mengidentifikasi perubahan kewenangan dibandingkan UU sebelumnya sebagai pra-analisis sebelum kelas Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				23/2014. Makalah memuat: (1) identifikasi minimal tiga substansi perubahan utama antara kedua regulasi; (2) faktor pendorong perubahan berdasarkan konteks politik dan historis; (3) implikasi perubahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan (4) satu contoh konkret dampak perubahan regulasi tersebut terhadap daerah di Indonesia, diutamakan dari Kawasan Timur Indonesia atau Gorontalo bila data tersedia. Tugas merupakan pendalaman dari analisis kelompok yang dilakukan di kelas dan membangun fondasi untuk analisis struktur kewenangan pada minggu ke-4 Deliverable: Makalah analisis individual; format Word/Google Docs; 3-4 halaman A4 (tidak termasuk daftar pustaka); menggunakan minimal 3			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				sumber dari daftar pustaka RPS dan minimal 1 dokumen regulasi resmi dari JDIH; diunggah ke LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan minggu ke-4; wajib menyertakan pernyataan penggunaan AI jika digunakan			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Analisis kasus tertulis (20 menit): mahasiswa diberikan satu skenario konflik kewenangan antar-level pemerintahan dan diminta mengidentifikasi jenis urusan serta dasar regulasinya dalam UU No. 23/2014; dinilai berdasarkan ketepatan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka dengan tinjauan singkat atas pra-analisis kelompok (10 menit); dilanjutkan paparan tentang implikasi recentralisasi UU No. 23/2014 dan kaitannya dengan UU No. 6/2023; sesi kedua diisi presentasi dan diskusi policy memo kelompok yang difasilitasi dosen (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Tiap kelompok mempresentasikan peta kewenangan dan temuan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah matriks pembagian urusan pemerintahan berdasarkan lampiran UU No. 23/2014 (dalam format tabel interaktif) ke LMS UNISAN beserta instruksi pengisian kolom analisis; dosen membuka sesi tanya-jawab asinkron di forum LMS untuk mengklarifikasi perbedaan urusan absolut, konkuren wajib, dan konkuren pilihan (via LMS; sinkron/asinkron).	Bahan Kajian: • Kerangka regulasi UU No. 23/2014; • Struktur dan kewenangan pemerintah daerah; Pustaka: Aziz & Arnold (2020); Hijri (2016); Kaho (2010); Syafrudin (2006); Republik Indonesia (UU No. 23 Tahun 2014).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			identifikasi, kedalaman analisis, dan akurasi referensi regulasi (rubrik 4 level) Partisipasi kelas & laboratorium: Kualitas kontribusi dalam diskusi berbasis studi kasus; mahasiswa dinilai berdasarkan kemampuan menghubungkan ketentuan regulasi dengan konteks implementasi nyata di daerah, bukan sekadar hafalan pasal Tugas: Policy memo kelompok (3-4 orang): analisis satu bidang urusan konkuren	gap implementasi (5-7 menit per kelompok); kelas memberikan umpan balik konstruktif; dosen merangkum implikasi sistemik perubahan kewenangan terhadap daerah di Kawasan Timur Indonesia MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kelompok menyempurnakan policy memo berdasarkan umpan balik kelas dan menyertakan satu rekomendasi penyesuaian yang kontekstual (nilai Creativity dan Nationalism ICHSA-N), sebagai latihan perumusan kebijakan yang akan dikembangkan lebih lanjut pada minggu-minggu berikutnya Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60' Tugas:	Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh matriks, melengkapi kolom analisis untuk satu bidang urusan yang ditugaskan per kelompok menggunakan dokumen UU No. 23/2014 dari JDIH, dan mengunggah hasil pra-analisis ke LMS UNISAN sebelum sesi luring; mahasiswa juga dapat mengakses data SIPD Kemendagri untuk melihat profil kewenangan daerah MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: tiap kelompok mulai menyusun peta kewenangan (authority mapping) untuk bidang urusan yang ditugaskan sebagai produk awal yang akan disempurnakan menjadi policy memo		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			wajib yang berkaitan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur) di Gorontalo -- memuat pemetaan kewenangan, temuan gap implementasi, dan satu rekomendasi penyesuaian; 3-4 halaman A4, dikumpulkan di LMS UNISAN	Kelompok (3-4 orang) menyusun policy memo yang menganalisis pembagian kewenangan satu bidang urusan konkuren wajib berkaitan pelayanan dasar (pilih: pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur jalan) antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota di Gorontalo berdasarkan UU No. 23/2014. Policy memo memuat: (1) pemetaan kewenangan per level pemerintahan untuk bidang yang dipilih; (2) identifikasi minimal dua gap atau tumpang tindih implementasi yang dapat dibuktikan dengan data atau dokumen; (3) analisis penyebab gap berdasarkan perspektif teoretis yang telah dipelajari pada minggu 1-3; dan (4) satu rekomendasi penyesuaian yang kontekstual dan dapat dioperasionalkan. Tugas ini merupakan kulminasi analisis minggu 3-4 dan	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				menjadi referensi awal untuk materi hubungan pusat-daerah pada pertemuan berikutnya Deliverable: Policy memo kelompok; format Word/Google Docs; 3-4 halaman A4 (tidak termasuk lampiran matriks kewenangan dan daftar pustaka); menggunakan minimal 1 dokumen regulasi resmi dari JDIH dan minimal 2 sumber dari daftar pustaka RPS; dilengkapi lampiran matriks kewenangan dalam format tabel; diunggah ke LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan minggu ke-5; wajib menyertakan pernyataan kontribusi anggota dan pernyataan penggunaan AI jika digunakan			
5,6	Sub-CPMK3: Menganalisis struktur kelembagaan dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat,	Mahasiswa mampu: Mengidentifikasi susunan kelembagaan	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi dengan pemaparan singkat	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah modul ringkas struktur	Bahan Kajian: Struktur kelembagaan pemerintah pusat,	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan UU No. 23/2014 beserta peraturan turunannya, mencakup urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum.	pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota beserta fungsi masing-masing tingkatan sesuai UU No. 23/2014 • Mengklasifikasikan urusan pemerintahan absolut, konkuren wajib, konkuren pilihan, dan urusan umum berdasarkan lampiran UU No. 23/2014 • Menganalisis logika pembagian urusan konkuren antara provinsi dan kabupaten/kota pada minimal dua bidang urusan (misalnya pendidikan dan kesehatan) • Menjelaskan posisi dan peran DPRD dalam struktur kelembagaan pemerintah daerah	Kuis identifikasi klasifikasi urusan pemerintahan: mahasiswa mengelompokkan 10 contoh urusan ke dalam kategori absolut, konkuren wajib pelayanan dasar, konkuren wajib non-pelayanan dasar, pilihan, dan umum; dinilai berdasarkan ketepatan kategori dan kelengkapan argumen regulatif Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi pemetaan urusan: mahasiswa menyampaikan minimal satu analogi atau contoh kontekstual dari daerah di	(15 menit) menggunakan diagram hierarki kelembagaan dan matriks urusan; memfasilitasi diskusi pleno hasil analisis kasus yang dikerjakan daring; menutup dengan klarifikasi konseptual tentang logika pembagian urusan konkuren (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan temuan analisis kasus secara berkelompok (3-4 orang); kelompok lain memberikan tanggapan terstruktur; dosen memberikan umpan balik normatif mengacu pada UU No. 23/2014 MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: diskusi kelas berbasis kasus sengketa kewenangan nyata;	kelembagaan dan infografis klasifikasi urusan pemerintahan ke LMS UNISAN; menyediakan tautan JDIH ke teks lengkap UU No. 23/2014 beserta lampirannya; membuka forum diskusi asinkron dengan pertanyaan pemantik: 'Mengapa urusan konkuren dibagi menurut skala dan dampak, bukan sekadar wilayah administratif?' (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa membaca modul dan mengunduh lampiran UU No. 23/2014 melalui JDIH; menjawab pertanyaan pemantik di forum LMS dengan mengacu pada setidaknya satu pasal regulasi; mengisi lembar kerja pra-kuliah klasifikasi urusan sebelum pertemuan	provinsi, dan kabupaten/kota; • Klasifikasi urusan pemerintahan: absolut, konkuren wajib, konkuren pilihan, dan umum; • Pembagian urusan konkuren antara provinsi dan kabupaten/kota; • Kedudukan DPRD dalam struktur pemerintahan daerah; Pustaka: Syafrudin (2006); Aziz & Arnold (2020); Republik Indonesia UU No. 23 Tahun 2014; Seymour & Turner (2002).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sebagai mitra eksekutif daerah	Kawasan Timur Indonesia; etika akademik dijaga dengan tidak memonopoli giliran berbicara dan menghargai perspektif rekan Tugas: Tabel pemetaan urusan pemerintahan: mahasiswa menyusun tabel tiga kolom (jenis urusan, karakteristik regulatif, contoh konkret di Provinsi Gorontalo atau kabupaten/kota sekitarnya) untuk minimal 8 urusan; maksimal 2 halaman A4 tidak termasuk tabel	mahasiswa berlatih menerapkan klasifikasi urusan dari regulasi ke situasi empiris dan mendiskusikan implikasinya terhadap tata kelola daerah Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individu menyusun tabel pemetaan urusan pemerintahan untuk Provinsi Gorontalo atau salah satu kabupaten/kota di dalamnya, mengacu langsung pada lampiran UU No. 23/2014. Tabel memuat jenis urusan, karakteristik regulatif singkat (dasar pasal), dan satu contoh program/kegiatan nyata yang pernah dilaksanakan pemda tersebut. Mahasiswa mencantumkan pernyataan penggunaan AI jika memanfaatkan Generative AI sebatas penyuntingan bahasa,	luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menganalisis secara mandiri satu kasus sengketa kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota yang dipublikasikan media nasional, mengidentifikasi jenis urusan yang dipersengketakan dan dasar hukumnya Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				sesuai Pedoman Penggunaan AI Generatif UNISAN. Deliverable: Tabel pemetaan urusan (minimal 8 urusan, format Word/Google Docs, maksimal 2 halaman A4 tidak termasuk tabel) diunggah ke LMS UNISAN sebelum pertemuan Minggu 6			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada kuis tertulis pada minggu ini; penilaian kognitif dilakukan melalui lembar analisis kasus individual yang dikumpulkan; kriteria: ketajaman identifikasi akar konflik, ketepatan rujukan pasal	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi simulasi sidang mediasi kewenangan (30 menit): tiga kelompok mewakili pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dosen bertindak sebagai mediator; diikuti debriefing pleno tentang implikasi konflik kewenangan terhadap kualitas pelayanan publik di daerah (tatap muka di kelas).	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah dua studi kasus konflik kewenangan yang terdokumentasi (dapat bersumber dari putusan Mahkamah Agung atau laporan Kemendagri) ke LMS UNISAN disertai panduan analisis; menyediakan rekaman penjelasan singkat (10-12 menit) tentang tipologi konflik dan mekanisme penyelesaiannya (via	Bahan Kajian: • Tipologi konflik kewenangan antara pusat dan daerah; • Mekanisme penyelesaian konflik kewenangan: jalur administratif dan yudisial; • Hubungan pengawasan pusat terhadap daerah dalam kerangka UU No. 23/2014;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			regulasi, dan kelogisan rekomendasi penyelesaian Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi substantif dalam simulasi sidang mediasi kewenangan: mahasiswa berperan sebagai pihak (pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota) dan menyampaikan argumen berbasis regulasi; dinilai dari kualitas argumen dan ketaatan terhadap etika diskusi akademik yang mencerminkan nilai Harmony ICHSA-N	Mekanisme & materi: Mahasiswa mempersiapkan argumen kelompok berdasarkan analisis draf yang telah dibuat; setelah simulasi, merevisi lembar analisis individu berdasarkan perspektif yang muncul dalam simulasi dan umpan balik dosen MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning dengan simulasi peran: mahasiswa menerapkan pengetahuan regulatif pada skenario konflik kewenangan otentik dan berlatih argumentasi berbasis bukti hukum, menginternalisasi nilai Integrity dalam menyajikan data regulatif secara akurat Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh dan membaca dua studi kasus; memilih satu untuk dianalisis secara panduan analisis yang disediakan; mengunggah draf analisis ke forum LMS untuk mendapatkan umpan balik sejawat sebelum pertemuan luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: analisis mandiri kasus konflik kewenangan nyata; mahasiswa dilatih menelaah dokumen kebijakan dan regulasi sebagai bukti primer, bukan sekadar opini Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	• Implikasi konflik kewenangan terhadap pelayanan publik daerah; Pustaka: Aziz & Arnold (2020); Rondinelli (1999); Syafrudin (2006); Republik Indonesia UU No. 23 Tahun 2014; Hijri (2016).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tugas: Lembar analisis kasus konflik kewenangan: narasi analisis minimal 400 kata dan maksimal 600 kata, memuat identifikasi pihak, jenis urusan yang dipersengketakan, dasar hukum masing-masing pihak, dan satu rekomendasi penyelesaian; dikumpulkan di LMS UNISAN	Tugas: Mahasiswa secara individu menyusun lembar analisis kasus konflik kewenangan yang dipilih dari dua studi kasus yang disediakan dosen. Analisis memuat: (1) identifikasi para pihak dan jenis urusan yang dipersengketakan, (2) dasar hukum masing-masing pihak mengacu pada pasal-pasal UU No. 23/2014 yang relevan, (3) penilaian mahasiswa tentang pihak mana yang argumennya lebih kuat secara regulatif, dan (4) satu rekomendasi mekanisme penyelesaian yang realistis. Bila menggunakan Generative AI untuk penyuntingan bahasa, mahasiswa wajib mencantumkan pernyataan penggunaan sesuai Pedoman UNISAN; analisis substantif tidak boleh didelegasikan ke AI. Deliverable: Lembar analisis kasus (minimal			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				400 kata, maksimal 600 kata, format Word/Google Docs) diunggah ke LMS UNISAN paling lambat dua hari setelah pertemuan luring Minggu 6; menjadi bekal konseptual untuk analisis fiskal Minggu 7			
7	Sub-CPMK4: Menganalisis dinamika hubungan fiskal pusat–daerah—meliputi mekanisme transfer Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil—serta mengidentifikasi permasalahan ketimpangan fiskal yang dialami daerah di Kawasan Timur Indonesia.	Mahasiswa mampu: • Menjelaskan mekanisme transfer fiskal dari pusat ke daerah mencakup Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil sesuai kerangka regulasi yang berlaku • Menganalisis komposisi dan proporsi komponen pendapatan daerah (PAD, dana transfer, lain-lain pendapatan sah) pada APBD minimal dua daerah di Kawasan Timur Indonesia menggunakan data	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada kuis terpisah; penilaian kognitif dilakukan melalui lembar analisis data fiskal yang merupakan bagian dari penugasan; kriteria: keakuratan pembacaan data APBD dari sumber resmi DJPK, ketepatan perhitungan proporsi komponen pendapatan, dan kedalaman	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka dengan penjelasan konseptual mekanisme transfer fiskal (15 menit) menggunakan contoh angka nyata dari DJPK; memfasilitasi sesi pembacaan data bersama (data clinic) di mana tiap kelompok memaparkan tabel komposisi APBD daerah pilihannya dan mendiskusikan implikasi ketimpangan fiskal; dosen memberikan umpan balik analitik (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa dalam kelompok (3-4 orang)	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan navigasi portal DJPK Kemenkeu RI dan SIPD Kemendagri untuk mengunduh data APBD; menyediakan template tabel analisis fiskal standar di LMS UNISAN; merekam tutorial singkat (10 menit) cara membaca komponen transfer DAU, DAK, dan DBH dari dokumen APBD resmi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses portal DJPK atau BPS	Bahan Kajian: • Mekanisme transfer fiskal: DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil; • Komposisi dan struktur APBD daerah; • Pendapatan Asli Daerah dan ketergantungan fiskal pada transfer pusat; • Ketimpangan fiskal antardaerah di Kawasan Timur Indonesia; • Hubungan kapasitas fiskal dengan penyelenggaraan urusan konkuren;	7

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		DJPK Kemenkeu RI - Mengidentifikasi indikator-indikator ketimpangan fiskal antardaerah dan menghubungkannya dengan kapasitas fiskal yang rendah di kabupaten/kota Kawasan Timur Indonesia - Mengaitkan pola ketergantungan fiskal daerah pada dana transfer dengan kapasitas penyelenggaraan urusan konkuren yang dianalisis pada Minggu 5 dan 6	analisis implikasi ketimpangan Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi pembacaan bersama data APBD: mahasiswa menyampaikan temuan awal data fiskal daerah yang dipilih; kontribusi dinilai dari spesifisitas data yang dikutip (bukan generalisasi) dan kemampuan menghubungkan angka dengan kondisi riil tata kelola daerah; etika penggunaan data publik mencerminkan nilai Integrity ICHSA-N	mempresentasikan temuan data fiskal menggunakan tabel dan grafik yang telah disiapkan; kelompok lain memberikan pertanyaan kritis; diskusi diarahkan ke perbandingan kapasitas fiskal daerah di Kawasan Timur Indonesia dengan standar nasional MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan sesi data clinic: mahasiswa menganalisis data fiskal nyata secara kolaboratif, menginternalisasi nilai Adaptability dalam membaca dinamika fiskal daerah yang berubah setiap siklus anggaran, serta nilai Nationalism dalam memahami pentingnya pemerataan fiskal untuk kesatuan pembangunan nasional	Gorontalo untuk mengunduh data APBD tahun anggaran terkini dari dua daerah yang dipilih (minimal satu kabupaten/kota di Gorontalo atau Kawasan Timur Indonesia); mengisi template tabel analisis sebelum pertemuan luring MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa mengerjakan proyek analisis data fiskal berbasis sumber data pemerintah resmi; melatih kemampuan literasi data anggaran sebagai kompetensi technopreneurship berbasis bukti Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Pustaka: Shah (2006); Aziz & Arnold (2020); Republik Indonesia PP No. 12 Tahun 2019; Kaho (2010); Seymour & Turner (2002).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tugas: Laporan analisis fiskal komparatif dua daerah di Kawasan Timur Indonesia: memuat tabel komposisi APBD, grafik proporsi sumber pendapatan, dan narasi analisis ketimpangan fiskal; maksimal 3 halaman A4 teks tidak termasuk tabel dan grafik	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara berkelompok (3-4 orang) menyusun laporan analisis fiskal komparatif antara dua daerah di Kawasan Timur Indonesia (minimal satu dari Provinsi Gorontalo) menggunakan data APBD resmi dari DJPK Kemenkeu RI atau BPS Gorontalo tahun anggaran terkini. Laporan memuat: (1) tabel komposisi APBD kedua daerah (PAD, DAU, DAK, DBH, lain-lain pendapatan sah), (2) grafik proporsi sumber pendapatan dalam format batang atau lingkaran, (3) narasi analisis ketimpangan fiskal: daerah mana yang lebih bergantung pada transfer pusat dan apa implikasinya terhadap kapasitas otonomi daerah, serta (4) kaitan temuan dengan kapasitas			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				penyelenggaraan urusan konkuren yang dipelajari Minggu 5-6. Sumber data wajib dicantumkan dengan tautan atau tangkapan layar portal resmi. Penggunaan Generative AI hanya diizinkan untuk penyuntingan bahasa dengan pernyataan penggunaan yang wajib dilampirkan. Deliverable: Laporan analisis fiskal komparatif (maksimal 3 halaman A4 teks, dilengkapi tabel dan grafik, format Word/Google Docs) diunggah ke LMS UNISAN sebelum pertemuan Minggu 8 (UTS); laporan ini sekaligus berfungsi sebagai bahan kajian yang dapat dibawa ke UTS			
8		Mahasiswa mampu: Menjelaskan konsep-konsep dasar pemerintahan daerah,	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen atau pengawas memastikan kelancaran pelaksanaan UTS tertulis;	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah kisi-kisi UTS ke LMS UNISAN paling lambat	Bahan Kajian: Review: konsep dasar pemerintahan daerah dan desentralisasi (Minggu 1-	—

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		desentralisasi, dan otonomi daerah yang telah dikaji pada Minggu 1 hingga 4 • Mengklasifikasikan dan membandingkan urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum berdasarkan UU No. 23/2014 sesuai materi Minggu 5 dan 6 • Menganalisis mekanisme transfer fiskal dan ketimpangan fiskal daerah di Kawasan Timur Indonesia sesuai materi Minggu 7 • Mengintegrasikan konsep desentralisasi, struktur kewenangan, dan fiskal daerah dalam menjawab pertanyaan analitis lintas topik	Ujian Tengah Semester tertulis (daring via LMS UNISAN atau luring di kelas sesuai kebijakan program studi): mencakup seluruh materi Minggu 1-7; terdiri dari soal analisis kasus (bukan pilihan ganda murni) yang menuntut mahasiswa mengidentifikasi masalah, mengaitkan konsep regulatif, dan menyusun argumen terstruktur; dinilai berdasarkan ketepatan konsep, ketajaman analisis, dan kecukupan rujukan regulasi atau teori yang dipelajari	membacakan tata tertib ujian dan mengingatkan mahasiswa tentang larangan penggunaan AI generatif selama ujian sesuai Pedoman Penggunaan AI Generatif UNISAN; soal dibagikan sesuai alokasi waktu yang ditetapkan program studi (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengerjakan soal UTS secara mandiri dan jujur; menggunakan pengetahuan yang telah dibangun selama Minggu 1-7 untuk menjawab pertanyaan analisis kasus; diperbolehkan membawa catatan regulasi cetak (open-book terbatas) sesuai ketentuan yang ditetapkan dosen MP — Metode Pembelajaran: Ujian tertulis individual: penilaian sumatif formatif	tiga hari sebelum pelaksanaan: memuat cakupan topik Minggu 1-7, jenis pertanyaan (analisis kasus), dan rubrik penilaian umum; membuka sesi tanya jawab daring (forum atau sinkron singkat) untuk klarifikasi ruang lingkup materi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses kisi-kisi UTS di LMS UNISAN; mereview seluruh materi Minggu 1-7 termasuk modul, lembar analisis kasus, dan laporan fiskal yang telah disusun; mempersiapkan diri dengan membaca kembali regulasi kunci (UU No. 23/2014, PP No. 12/2019) melalui JDIH	4); • Review: struktur kelembagaan dan pembagian kewenangan UU No. 23/2014 (Minggu 5-6); • Review: mekanisme transfer fiskal dan ketimpangan daerah di Kawasan Timur Indonesia (Minggu 7); • Integrasi lintas topik: hubungan antara desentralisasi, kewenangan, dan fiskal daerah; Pustaka: Syafrudin (2006); Aziz & Arnold (2020); Rondinelli (1999); Seymour & Turner (2002); Shah (2006); Republik Indonesia UU No. 23 Tahun 2014; Republik Indonesia PP No. 12 Tahun 2019; Hijri (2016); Kaho (2010).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Partisipasi kelas & laboratorium: Tidak dinilai pada minggu UTS; etika akademik ujian (kejujuran, tidak menyalin, tidak menggunakan AI untuk menjawab soal substansi) sesuai nilai Integrity ICHSA-N menjadi prasyarat validitas hasil ujian Tugas: Tidak ada penugasan tambahan pada minggu UTS; hasil ujian tertulis merupakan satu-satunya instrumen penilaian minggu ini	yang mengukur capaian Sub-CPMK Minggu 1-7; mahasiswa mendemonstrasikan kemampuan mengintegrasikan konsep desentralisasi, kewenangan, dan fiskal daerah dalam analisis tertulis yang koheren Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Tidak ada penugasan baru pada Minggu 8. Mahasiswa memastikan seluruh tugas Minggu 1-7 telah diunggah ke LMS UNISAN sebelum pelaksanaan UTS. Laporan analisis fiskal komparatif dari Minggu 7 dapat dijadikan referensi persiapan ujian karena materi fiskal daerah termasuk dalam cakupan UTS. Deliverable: Lembar jawaban UTS tertulis yang	MP — Metode Pembelajaran: Review mandiri dan kolaboratif: mahasiswa dapat membentuk kelompok belajar mandiri untuk mendiskusikan kisi-kisi; tidak ada aktivitas SCL baru pada minggu ini karena fokus pada konsolidasi pemahaman Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				diserahkan kepada dosen atau pengawas pada hari pelaksanaan ujian sesuai jadwal program studi			
9,10	Sub-CPMK5: Mengevaluasi kinerja tata kelola dan pelayanan publik pemerintah daerah di lingkungan UNISAN/Gorontalo menggunakan kerangka penilaian berbasis bukti (minimal 3 indikator kinerja terstandar), yang dituangkan dalam laporan evaluasi tertulis.	Mahasiswa mampu: - Mengidentifikasi minimal 3 indikator kinerja terstandar (misalnya Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Inovasi Daerah, dan capaian SPM) yang relevan untuk mengevaluasi tata kelola pemerintah daerah Gorontalo - Menganalisis data kinerja pelayanan publik pemerintah daerah Gorontalo menggunakan data dari SIPD Kemendagri dan BPS Gorontalo secara kritis dan berbasis bukti - Membandingkan kondisi aktual kinerja tata kelola pemerintah	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis pada minggu ini; penilaian dilakukan melalui kualitas kerangka evaluasi yang disusun kelompok, dinilai berdasarkan ketepatan pemilihan indikator kinerja terstandar, kesesuaian sumber data yang dikutip, dan kejelasan metode penilaian yang direncanakan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi dengan paparan singkat (20 menit) tentang kerangka evaluasi kinerja pemerintah daerah berbasis indikator terstandar, dilanjutkan dengan memfasilitasi diskusi kelompok di mana setiap kelompok mempresentasikan draf pemilihan indikator dan menerima umpan balik kelas (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa membawa data awal yang telah ditelusuri dari SIPD Kemendagri dan BPS Gorontalo; dalam kelompok, mahasiswa mendiskusikan relevansi masing-masing indikator	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video kuliah singkat (15-20 menit) yang menjelaskan konsep evaluasi kinerja pemerintah daerah, kerangka indikator terstandar (IKD, IKM, SPM), dan panduan akses data dari SIPD Kemendagri serta BPS Gorontalo; dosen membuka forum diskusi asinkron di LMS UNISAN untuk tanya jawab seputar pemilihan indikator (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh bahan bacaan yang diunggah dosen, mengakses portal SIPD	Bahan Kajian: - Konsep evaluasi kinerja pemerintah daerah: definisi, tujuan, dan urgensi; - Kerangka indikator kinerja terstandar: Indeks Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan Minimal, dan Indeks Kemandirian Daerah; - Sumber data kinerja daerah: SIPD Kemendagri, BPS Gorontalo, dan laporan resmi pemerintah daerah; - Perancangan kerangka evaluasi berbasis bukti untuk konteks pemerintah daerah Gorontalo;	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		daerah Gorontalo dengan standar normatif yang ditetapkan regulasi atau kajian ilmiah • Merancang kerangka evaluasi awal (template laporan evaluasi) yang memuat indikator, sumber data, dan metode penilaian kinerja yang akan digunakan pada minggu berikutnya	Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi kelompok Case-Based Learning dinilai dari kemampuan memberikan argumen berbasis data kinerja daerah, bukan opini semata; mahasiswa menunjukkan nilai Integrity dengan menyajikan data SIPD/BPS apa adanya tanpa memanipulasi informasi Tugas: Kerangka evaluasi awal berbentuk template laporan (maksimal 3 halaman, format A4) memuat:	terhadap konteks Gorontalo dan menyempurnakan kerangka evaluasi berdasarkan masukan dosen dan rekan kelas MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelompok mempresentasikan draf kerangka evaluasi (5 menit per kelompok) diikuti sesi tanya jawab kritis antar kelompok; nilai Harmony diterapkan melalui kolaborasi lintas perspektif di mana setiap anggota menyumbangkan sudut pandang berbeda terhadap kasus yang sama Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap kelompok (3-4 mahasiswa) memilih satu pemerintah daerah di Gorontalo	Kemendagri dan BPS Gorontalo untuk menelusuri data kinerja pemerintah daerah Gorontalo, menyimak video kuliah, lalu berdiskusi dalam kelompok secara daring untuk menyepakati indikator yang akan digunakan MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa secara berkelompok menganalisis satu kasus nyata kinerja pemerintah daerah Gorontalo berdasarkan data publik yang tersedia di SIPD Kemendagri dan BPS Gorontalo, kemudian mendiskusikan pemilihan indikator evaluasi yang paling representatif melalui forum LMS UNISAN	Pustaka: Shah (2006); Syafrudin (2006); Aziz & Arnold (2020); Republik Indonesia (UU No. 23 Tahun 2014).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			judul studi kasus, pemilihan pemerintah daerah Gorontalo yang dievaluasi, minimal 3 indikator kinerja terstandar beserta definisi operasionalnya, sumber data yang akan digunakan, dan rencana metode analisis; dikumpulkan via LMS UNISAN	(kabupaten/kota) sebagai studi kasus, menelusuri data kinerja tata kelola dan pelayanan publiknya dari SIPD Kemendagri dan BPS Gorontalo, kemudian menyusun kerangka evaluasi awal yang memuat minimal 3 indikator kinerja terstandar beserta definisi operasional, sumber data, dan rencana metode analisis; kelompok yang berbeda dianjurkan memilih daerah yang berbeda agar diskusi kelas mencakup variasi antar daerah di Gorontalo Deliverable: Template kerangka evaluasi (maksimal 3 halaman, format A4, diunggah ke LMS UNISAN) berisi: identitas studi kasus, daftar minimal 3 indikator kinerja terstandar dengan definisi operasional masing-masing, sumber data primer yang akan digunakan, rencana	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				metode analisis, dan pernyataan penggunaan AI Generatif bila digunakan			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis pada minggu ini; penilaian berpusat pada laporan evaluasi tertulis yang dinilai menggunakan rubrik 4 dimensi: (1) ketepatan dan konsistensi penggunaan minimal 3 indikator kinerja terstandar, (2) kedalaman analisis kesenjangan berbasis data valid dari SIPD/BPS, (3) ketajaman identifikasi faktor penyebab	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi presentasi laporan evaluasi (10 menit presentasi dan 5 menit tanya jawab per kelompok) di mana setiap kelompok memaparkan temuan utama kinerja pemerintah daerah yang dievaluasi; dosen memberikan umpan balik substantif tentang ketajaman analisis dan kualitas bukti yang digunakan (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyimak presentasi kelompok lain dan memberikan umpan balik tertulis singkat menggunakan lembar peer review yang disediakan dosen; perbandingan temuan antar kelompok	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan teknis penulisan laporan evaluasi dan contoh laporan evaluasi kinerja pemda (anonimasi) di LMS UNISAN; dosen membuka sesi konsultasi kelompok secara daring (via video call atau forum LMS) untuk membantu pengayaan analisis sebelum laporan final dikumpulkan (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses panduan penulisan dan contoh laporan yang diunggah dosen, kemudian secara kelompok menyelesaikan analisis data dari SIPD Kemendagri dan BPS	Bahan Kajian: • Metodologi analisis kinerja pemerintah daerah berbasis data: langkah-langkah analisis kesenjangan; • Penerapan indikator kinerja terstandar pada konteks pemerintah daerah Gorontalo: IKM, SPM, dan Indeks Inovasi Daerah; • Faktor-faktor penentu kualitas tata kelola dan pelayanan publik daerah: kelembagaan, regulasi, kapasitas SDM; • Penulisan laporan evaluasi kinerja pemerintah daerah yang berbasis bukti dan berintegritas akademik;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kesenjangan, dan (4) sistematika serta integritas akademik penulisan laporan Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi presentasi dan umpan balik antara kelompok dinilai dari kemampuan memberikan kritik konstruktif berbasis data terhadap temuan kelompok lain; mahasiswa menunjukkan nilai Harmony melalui diskusi yang menghargai perbedaan temuan antar daerah studi kasus Tugas:	(lintas kabupaten/kota Gorontalo) memperkaya pemahaman tentang variasi kinerja tata kelola daerah di Kawasan Timur Indonesia MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan forum presentasi: kelompok mempresentasikan laporan evaluasi mereka kepada kelas sebagai forum berbagi temuan; nilai Service diwujudkan dengan merefleksikan bagaimana temuan evaluasi dapat digunakan untuk mendorong pembenahan pelayanan publik bagi masyarakat lokal Gorontalo Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap kelompok melanjutkan pekerjaan dari	Gorontalo serta mengintegrasikan seluruh temuan ke dalam laporan evaluasi tertulis yang diunggah ke LMS UNISAN sebelum batas waktu MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kelompok menyelesaikan satu produk nyata berupa laporan evaluasi tertulis kinerja pemerintah daerah Gorontalo yang dapat dijadikan bahan masukan kebijakan; proses penulisan dilakukan secara kolaboratif daring menggunakan Google Docs dengan rekam jejak kontribusi anggota yang dapat diperiksa dosen Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Pustaka: Shah (2006); Syafrudin (2006); Aziz & Arnold (2020); Kaho (2010); Republik Indonesia (UU No. 23 Tahun 2014).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Laporan evaluasi tertulis per kelompok (1.500-2.000 kata, tidak termasuk lampiran data, format A4) memuat: pendahuluan dan konteks studi kasus, kerangka evaluasi yang digunakan, analisis data kinerja berdasarkan minimal 3 indikator, temuan kesenjangan dan faktor penyebab, serta daftar pustaka dan pernyataan penggunaan AI Generatif bila digunakan; dikumpulkan via LMS UNISAN	minggu ke-9 dengan menganalisis data kinerja pemerintah daerah Gorontalo yang dipilih, mengidentifikasi kesenjangan antara capaian aktual dengan standar normatif menggunakan minimal 3 indikator terstandar, menjelaskan faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut, lalu menuangkan seluruh analisis dalam laporan evaluasi tertulis yang sistematis dan berbasis bukti; penggunaan AI Generatif hanya diizinkan untuk penyuntingan bahasa dan wajib dideklarasikan secara eksplisit dalam laporan Deliverable: Laporan evaluasi tertulis per kelompok (1.500-2.000 kata, tidak termasuk lampiran, diunggah ke LMS UNISAN) berisi: pendahuluan dan profil singkat daerah studi kasus, kerangka evaluasi dan			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				definisi operasional indikator, analisis data kinerja berdasarkan minimal 3 indikator terstandar, identifikasi kesenjangan dan faktor penyebabnya, kesimpulan evaluatif, daftar pustaka berformat konsisten, dan pernyataan penggunaan AI Generatif			
11,12	Sub-CPMK6: Mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah— mencakup penyusunan APBD, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban— melalui analisis dokumen resmi (APBD/LHP BPK) studi kasus satu pemerintah daerah di Gorontalo, dengan mengidentifikasi temuan kritis dan implikasinya terhadap kualitas layanan publik.	Mahasiswa mampu: • Menjelaskan tahapan siklus pengelolaan keuangan daerah— perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban— sesuai PP No. 12 Tahun 2019 • Mengidentifikasi struktur dokumen APBD (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) dan dokumen LHP BPK	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis singkat di akhir sesi luring (10 soal pilihan ganda atau uraian singkat, dikerjakan individual, 15 menit) menguji pemahaman tentang tahapan siklus pengelolaan keuangan daerah sesuai PP No. 12 Tahun 2019 dan kemampuan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memaparkan kerangka regulasi pengelolaan keuangan daerah (PP No. 12 Tahun 2019) secara ringkas (25 menit), kemudian memandu simulasi membaca bersama satu petikan dokumen APBD Gorontalo yang ditampilkan melalui LCD proyektor; dosen menjelaskan cara mengidentifikasi pos-pos kritis dalam APBD dan LHP BPK yang akan menjadi fokus analisis minggu ke-12 (tatap muka	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video penjelasan (20-25 menit) tentang siklus pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 disertai panduan cara mengakses dan membaca dokumen APBD dari portal DJPK Kemenkeu dan SIPD Kemendagri; dosen mengunggah dokumen contoh APBD dan petikan LHP BPK (anonimasi bila diperlukan) sebagai bahan latihan awal (via	Bahan Kajian: • Siklus pengelolaan keuangan daerah: perencanaan, penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai PP No. 12 Tahun 2019; • Struktur dokumen APBD: komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah; • Fungsi dan format Laporan Hasil	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dari satu pemerintah daerah di Gorontalo secara tepat • Menganalisis komposisi pendapatan dan belanja daerah dari dokumen APBD yang tersedia menggunakan data dari DJPK Kemenkeu untuk mengidentifikasi pola alokasi anggaran • Merancang instrumen analisis dokumen (matriks telaah) yang akan digunakan untuk mengidentifikasi temuan kritis dari APBD dan LHP BPK pada minggu berikutnya	membaca struktur dokumen APBD secara dasar; jawaban dinilai berdasarkan ketepatan konsep dan kesesuaian dengan regulasi Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam simulasi telaah dokumen APBD awal dinilai dari kemampuan mahasiswa mengajukan pertanyaan substantif berbasis dokumen nyata, bukan pertanyaan yang bisa dijawab tanpa membaca dokumen; mahasiswa menunjukkan nilai Adaptability dengan menyesuaikan	di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa secara berkelompok mulai menelaah dokumen APBD yang telah diunduh dari DJPK Kemenkeu menggunakan draf matriks telaah yang telah disiapkan; setiap kelompok mempresentasikan temuan awal mereka (5 menit) untuk mendapatkan umpan balik dosen sebelum analisis mendalam dilanjutkan di minggu ke-12 MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa bekerja dengan dokumen APBD nyata pemerintah daerah Gorontalo sebagai kasus; nilai Integrity ditekankan melalui penekanan bahwa data anggaran harus disajikan apa adanya	LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyimak video kuliah, mengakses portal DJPK Kemenkeu untuk mengunduh data APBD pemerintah daerah Gorontalo yang dipilih kelompoknya, membaca panduan telaah dokumen yang disediakan dosen, lalu mulai mengisi draf matriks telaah dokumen secara mandiri sebelum didiskusikan bersama kelompok MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa secara berkelompok menganalisis dokumen APBD nyata pemerintah daerah Gorontalo yang diperoleh dari DJPK Kemenkeu sebagai kasus konkret,	Pemeriksaan (LHP) BPK sebagai instrumen akuntabilitas keuangan daerah; • Sumber dan cara mengakses data fiskal daerah: portal DJPK Kemenkeu dan SIPD Kemendagri untuk Gorontalo; Pustaka: Republik Indonesia (PP No. 12 Tahun 2019); Republik Indonesia (UU No. 23 Tahun 2014); Shah (2006); Syafrudin (2006).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pemahaman konsep terhadap format dokumen APBD nyata yang mungkin berbeda dari teori Tugas: Matriks telaah dokumen per kelompok (1 halaman tabel, format A4) memuat: nama dan tahun anggaran daerah yang dipilih, struktur pendapatan dan belanja utama dari APBD, daftar temuan awal yang perlu dikaji lebih lanjut di minggu ke-12, dan kolom untuk mencatat rujukan pasal PP No. 12 Tahun 2019 yang relevan;	sesuai dokumen resmi tanpa interpretasi yang menyimpang dari fakta Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap kelompok (melanjutkan komposisi dari minggu ke-9 dan ke-10 atau disesuaikan oleh dosen) mengunduh dokumen APBD tahun terakhir yang tersedia dan petikan LHP BPK dari satu pemerintah daerah di Gorontalo via portal DJPK Kemenkeu atau SIPD Kemendagri, kemudian menyusun matriks telaah dokumen yang mengidentifikasi struktur pendapatan dan belanja utama, pola alokasi anggaran, serta daftar pertanyaan kritis yang akan dijawab melalui analisis mendalam di minggu ke-12; kelompok wajib mencantumkan tautan atau sumber	mengidentifikasi struktur anggaran dan pola alokasi, kemudian mendiskusikan temuan awal di forum LMS UNISAN Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			dikumpulkan via LMS UNISAN	unduh dokumen yang digunakan Deliverable: Matriks telaah dokumen per kelompok (1 halaman tabel, format A4, diunggah ke LMS UNISAN) berisi: identitas dokumen APBD dan LHP BPK yang digunakan (nama daerah, tahun anggaran, sumber unduhan), ringkasan struktur pendapatan dan belanja utama, daftar minimal 5 pertanyaan analitis tentang temuan yang perlu dikaji lebih lanjut, dan kolom rujukan pasal PP No. 12 Tahun 2019 yang relevan			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis pada minggu ini; penilaian berpusat pada laporan analisis keuangan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi presentasi laporan analisis (10 menit presentasi dan 5 menit tanya jawab per kelompok) di mana setiap kelompok memaparkan temuan kritis dari APBD dan LHP BPK serta	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan teknis analisis LHP BPK dan contoh pola temuan umum dalam dokumen LHP BPK pemerintah daerah (anonimasi) di LMS UNISAN; dosen	Bahan Kajian: Analisis kritis dokumen APBD: mengidentifikasi ketidaksesuaian alokasi, penyimpangan pelaksanaan, dan catatan pertanggungjawaban;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			daerah yang dinilai menggunakan rubrik 4 dimensi: (1) ketepatan identifikasi temuan kritis dalam dokumen APBD dan LHP BPK, (2) kedalaman analisis implikasi terhadap kualitas layanan publik, (3) kualitas keterkaitan analisis antara pengelolaan keuangan dan kinerja pelayanan publik (membangun dari temuan minggu ke-9 dan ke-10), dan (4) integritas akademik: kejelasan sumber data, ketepatan kutipan regulasi, dan transparansi penggunaan AI Generatif bila	implikasinya terhadap layanan publik; dosen merangkum variasi temuan lintas daerah Gorontalo dan mengaitkannya dengan pola pengelolaan keuangan daerah di Kawasan Timur Indonesia secara lebih luas (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyimak presentasi kelompok lain dan memberikan umpan balik konstruktif menggunakan lembar peer review yang berfokus pada kedalaman analisis temuan kritis dan relevansi implikasi yang diidentifikasi; diskusi kelas difokuskan pada perbandingan pola temuan antar daerah untuk membangun pemahaman komprehensif tentang tata kelola keuangan daerah Gorontalo	membuka sesi konsultasi daring untuk setiap kelompok guna membantu pengayaan analisis temuan kritis sebelum laporan final dikumpulkan (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses panduan analisis LHP BPK yang diunggah dosen, melanjutkan telaah dokumen APBD dan LHP BPK yang telah dimulai pada minggu ke-11, mengintegrasikan temuan dengan data kinerja dari analisis minggu ke-9 dan ke-10, lalu menyelesaikan laporan analisis keuangan daerah secara kolaboratif menggunakan Google Docs dan mengunggahnya ke LMS UNISAN	• Membaca dan menginterpretasikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK: jenis temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut; • Implikasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas dan aksesibilitas layanan publik; • Integrasi analisis keuangan dan kinerja tata kelola: menghubungkan kapasitas fiskal dengan capaian pelayanan publik di Gorontalo; Pustaka: Republik Indonesia (PP No. 12 Tahun 2019); Republik Indonesia (UU No. 23 Tahun 2014); Shah (2006); Syafrudin (2006); Kaho (2010).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			digunakan Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam forum diskusi dan presentasi laporan dinilai dari kemampuan mahasiswa mengajukan argumen analitis berbasis temuan dokumen resmi dan merespons kritik secara substantif; nilai Adaptability ditunjukkan dengan kemampuan menyesuaikan argumen ketika dihadapkan pada data atau perspektif baru dari kelompok lain Tugas:	MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan forum presentasi dan diskusi kritis: nilai Harmony diwujudkan melalui diskusi yang menghargai keberagaman temuan antar kelompok; nilai Service diwujudkan dengan merefleksikan bagaimana temuan analisis keuangan daerah dapat digunakan untuk mendorong pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik demi kepentingan masyarakat Gorontalo Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap kelompok melanjutkan telaah dokumen dari minggu ke-11 dengan melakukan analisis mendalam terhadap temuan kritis dalam APBD dan LHP	MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kelompok menghasilkan produk nyata berupa laporan analisis keuangan daerah yang mengintegrasikan temuan dari dokumen APBD, LHP BPK, dan data kinerja pelayanan publik; produk ini dirancang sebagai bahan yang dapat digunakan sebagai masukan kebijakan nyata, mencerminkan nilai technopreneurship melalui pendekatan solutif berbasis data Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Laporan analisis keuangan daerah per kelompok (1.500-2.000 kata, tidak termasuk lampiran, format A4) memuat: identitas dokumen yang digunakan, ringkasan temuan kritis dari APBD dan LHP BPK, analisis implikasi terhadap kualitas layanan publik, keterkaitan dengan temuan kinerja dari laporan evaluasi minggu ke-9 dan ke-10, simpulan evaluatif, daftar pustaka berformat konsisten, dan pernyataan penggunaan AI Generatif bila digunakan; dikumpulkan via LMS UNISAN	BPK pemerintah daerah Gorontalo yang dipilih, menganalisis implikasi temuan tersebut terhadap kualitas layanan publik, dan mengaitkan temuan keuangan dengan hasil evaluasi kinerja tata kelola yang telah disusun pada laporan evaluasi minggu ke-9 dan ke-10; penggunaan AI Generatif hanya diizinkan untuk penyuntingan bahasa dan wajib dideklarasikan secara eksplisit dalam laporan Deliverable: Laporan analisis keuangan daerah per kelompok (1.500-2.000 kata, tidak termasuk lampiran data dan salinan dokumen, diunggah ke LMS UNISAN) berisi: identitas dokumen APBD dan LHP BPK yang dianalisis beserta sumber unduhan, ringkasan temuan kritis dengan rujukan pasal PP No. 12 Tahun 2019 yang relevan,			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				analisis implikasi terhadap kualitas layanan publik didukung data, keterkaitan analitis dengan temuan laporan evaluasi minggu ke-9 dan ke-10, simpulan evaluatif, daftar pustaka berformat konsisten, dan pernyataan penggunaan AI Generatif			
13,14	Sub-CPMK7: Mempresentasikan hasil analisis kebijakan pemerintahan daerah secara kolaboratif dalam forum diskusi kelas lintas perspektif, dengan menampilkan argumen berbasis data dan merespons sanggahan dari perspektif yang berbeda secara kritis dan konstruktif.	Mahasiswa mampu: • Mempresentasikan hasil analisis kebijakan pemerintahan daerah (desentralisasi, fiskal, pelayanan publik, atau kinerja pemda) secara kolaboratif dalam forum kelas dengan argumen yang didukung data dari DJPK, SIPD, atau BPS Gorontalo • Mengidentifikasi minimal dua perspektif berbeda (yuridis, fiskal, sosial-politik, atau lokal Kawasan Timur Indonesia) yang	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis pada minggu ini; penilaian berfokus pada kualitas argumentasi lisan berbasis data: kejelasan tesis, ketepatan data yang dikutip, dan kekritisannya merespons sanggahan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen bertindak sebagai moderator dan juri: membuka forum, mengatur giliran presentasi kelompok (± 15 menit per kelompok), memimpin sesi tanya-jawab lintas kelompok, memberikan umpan balik substantif setelah tiap presentasi, dan merangkul kesamaan serta perbedaan temuan antar-kelompok di akhir sesi (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Kelompok yang mendapat giliran mempresentasikan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi asinkron dengan mengunggah panduan teknis presentasi dan rubrik penilaian ke LMS UNISAN, kemudian memfasilitasi forum diskusi daring pra-presentasi agar tiap kelompok dapat mengunggah draf slide dan menerima umpan balik awal dari dosen maupun kelompok lain (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi:	Bahan Kajian: • Evaluasi kinerja pemerintah daerah (sintesis lintas topik untuk bahan presentasi); • Hubungan pusat-daerah dan konflik kewenangan sebagai kasus kebijakan potensial; • Fiskal daerah dan sumber pendapatan daerah sebagai kasus kebijakan potensial; • Tata kelola dan pelayanan publik daerah sebagai kasus kebijakan	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		tercermin dalam presentasi kelompok • Merespons sanggahan audiens dan kelompok lain secara kritis dan konstruktif dengan mengacu pada sumber data atau regulasi yang relevan • Menampilkan sikap kolaboratif antar-anggota kelompok selama sesi presentasi, mencerminkan nilai Harmony ICHSA-N dalam diskusi lintas perspektif	Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan seluruh anggota kelompok dalam menyampaikan bagian presentasi masing-masing; ketertiban saat menjadi audiens (mengajukan pertanyaan berbasis bukti, bukan opini semata); menjaga etika akademik dalam menanggapi perbedaan perspektif Tugas: Slide presentasi kelompok (PowerPoint/Google Slides, 12-18 slide) yang memuat: rumusan masalah kebijakan, data	analisis kebijakan dengan LCD proyektor; kelompok audiens menyiapkan minimal satu pertanyaan atau sanggahan berbasis data; seluruh mahasiswa mencatat poin kritis dari presentasi kelompok lain sebagai bahan refleksi MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelompok memaparkan kasus kebijakan pemda aktual (misalnya konflik kewenangan, disparitas PAD, atau inovasi pelayanan publik di Gorontalo/Kawasan Timur Indonesia) dan mempertahankan analisis di hadapan forum kelas lintas perspektif Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Tiap kelompok menyusun dan mempresentasikan	Mahasiswa mengakses rubrik penilaian presentasi dan contoh argumen berbasis data di LMS UNISAN, menelusuri data DJPK/SIPD/BPS Gorontalo yang relevan dengan topik kebijakan kelompok masing-masing, lalu menyelesaikan dan mengunggah slide final MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: tiap kelompok mengembangkan produk presentasi analisis kebijakan berbasis data empiris yang akan dipertahankan di forum kelas Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	potensial; Pustaka: Aziz & Arnold (2020); Rondinelli (1999); Seymour & Turner (2002); Shah (2006); Syafrudin (2006); Hijri (2016); Kaho (2010); Republik Indonesia (2014).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			empiris pendukung, analisis lintas perspektif, dan poin respons terhadap potensi sanggahan; dikumpulkan melalui LMS UNISAN sebelum sesi dimulai	analisis kebijakan pemerintahan daerah yang mencakup: (1) identifikasi masalah kebijakan berbasis data empiris (DJPK, SIPD, atau BPS Gorontalo), (2) analisis dari minimal dua perspektif berbeda (yuridis berdasarkan UU No. 23/2014, fiskal, sosial-politik, atau konteks lokal Kawasan Timur Indonesia), (3) respons tertulis terhadap potensi sanggahan yang disiapkan dalam slide. Penggunaan Generative AI sebagai alat bantu eksplorasi diizinkan dengan wajib mencantumkan pernyataan penggunaan AI sesuai Pedoman UNISAN; analisis substantif dan rekomendasi harus merupakan hasil penalaran sendiri (nilai Integrity ICHSA-N). Deliverable: Slide presentasi kelompok final (12-18 slide, format PDF atau PPTX) diunggah ke			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				LMS UNISAN sebelum sesi; lembar respons sanggahan (1 halaman per kelompok) dikumpulkan setelah sesi selesai			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis; penilaian mencakup peningkatan kualitas argumentasi dibanding sesi sebelumnya: ketajaman analisis lintas perspektif, ketepatan data yang dikutip, dan kemampuan mengintegrasikan umpan balik dari Minggu 13 Partisipasi kelas & laboratorium: Seluruh anggota kelompok aktif	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi dengan ringkasan temuan kunci dari Minggu 13 sebagai jembatan; memfasilitasi presentasi kelompok Sesi II (± 15 menit per kelompok); memimpin sesi tanya-jawab dan mendorong debat lintas perspektif yang produktif; menutup sesi dengan sintesis keseluruhan temuan dari Minggu 13 dan 14 sebagai landasan penyusunan policy brief di Minggu 15 (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Kelompok yang tampil mempresentasikan analisis menggunakan LCD proyektor; mahasiswa	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah rekapitulasi umpan balik dari Minggu 13 ke LMS UNISAN agar kelompok yang tampil di Sesi II dapat menyempurnakan slide; dosen membuka forum diskusi asinkron pasca-sesi untuk mahasiswa merefleksikan pembelajaran lintas perspektif dari kedua sesi presentasi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses rekapitulasi umpan balik Minggu 13 dan rubrik peer assessment di LMS UNISAN; kelompok yang tampil di Sesi II	Bahan Kajian: - Evaluasi kinerja pemerintah daerah (sintesis lintas topik untuk bahan presentasi Sesi II); - Rekomendasi kebijakan tata kelola daerah sebagai arah analisis menuju Minggu 15; - Tata kelola dan pelayanan publik daerah sebagai kasus kebijakan potensial; - Pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat sebagai kasus kebijakan potensial; Pustaka:	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			menyampaikan bagian presentasi; mahasiswa yang menjadi audiens mengajukan sanggahan atau pertanyaan berbasis bukti; mahasiswa mengisi lembar penilaian sejawat (peer assessment) secara jujur dan berdasarkan rubrik yang disediakan Tugas: Slide presentasi kelompok final (12-18 slide) dan lembar penilaian sejawat (peer assessment form) yang diisi oleh setiap mahasiswa untuk kelompok yang mereka nilai pada Sesi II; dikumpulkan	audiens mengisi lembar peer assessment selama dan sesaat setelah presentasi; catatan sintesis lintas sesi dibagikan dosen secara lisan dan visual di papan tulis MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelompok mempertahankan kasus kebijakan pemda aktual di hadapan forum lintas perspektif; peer assessment digunakan untuk membangun budaya evaluasi berbasis bukti dan sikap Adaptability dalam menerima kritik konstruktif Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Tiap kelompok menyelesaikan presentasi analisis kebijakan pemda dengan mengintegrasikan	menyesuaikan slide berdasarkan masukan; semua mahasiswa menyiapkan pertanyaan atau sanggahan tertulis sebelum hadir MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kelompok menyempurnakan produk analisis kebijakan berdasarkan iterasi umpan balik, kemudian mempertahankan argumen di forum kelas Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Aziz & Arnold (2020); Rondinelli (1999); Seymour & Turner (2002); Shah (2006); Syafrudin (2006); Hijri (2016); Kaho (2010); Republik Indonesia (2014); Republik Indonesia (2019).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			melalui LMS UNISAN	umpan balik dari Minggu 13. Setiap mahasiswa secara individual mengisi lembar peer assessment untuk kelompok yang dinilai, mencakup: kejelasan argumen, kualitas data yang digunakan, kemampuan merespons sanggahan, dan kolaborasi tim. Penilaian sejawat dilakukan jujur berdasarkan rubrik, bukan relasi pertemanan, sebagai latihan integritas akademik. Catatan: kelompok yang sudah tampil di Minggu 13 tidak perlu presentasi ulang, tetapi wajib berperan aktif sebagai audiens dan mengisi peer assessment. Deliverable: Slide presentasi final kelompok Sesi II (12-18 slide, PDF atau PPTX) diunggah ke LMS UNISAN sebelum sesi; lembar peer assessment individual (satu formulir per mahasiswa, format yang disediakan			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dosen) dikumpulkan melalui LMS UNISAN paling lambat 24 jam setelah sesi selesai			
15	Sub-CPMK8: Merumuskan rekomendasi pembenahan tata kelola pemerintahan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal Gorontalo/Kawasan Timur Indonesia, yang dituangkan dalam policy brief singkat (minimal 3 halaman) dengan struktur: ringkasan eksekutif, konteks masalah, opsi kebijakan, dan rekomendasi prioritas.	Mahasiswa mampu: - Merumuskan rekomendasi pembenahan tata kelola pemerintahan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat spesifik masyarakat lokal Gorontalo atau Kawasan Timur Indonesia, dituangkan dalam policy brief minimal 3 halaman - Menyusun struktur policy brief secara lengkap dan koheren: ringkasan eksekutif, konteks masalah berbasis data empiris, minimal dua opsi kebijakan beserta analisis kelebihan dan kekurangannya, dan rekomendasi prioritas	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis; penilaian terhadap kualitas policy brief: ketajaman identifikasi masalah berbasis data, kelayakan dan inovasi opsi kebijakan yang ditawarkan, koherensi argumen dari konteks masalah ke rekomendasi prioritas, serta relevansi konteks lokal Gorontalo atau Kawasan Timur Indonesia	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi dengan pengantar singkat tentang standar penulisan policy brief yang baik dan contoh dari konteks Indonesia Timur; memfasilitasi sesi klinik penulisan di mana tiap kelompok mempresentasikan draf policy brief (3-5 menit) dan menerima umpan balik langsung dari dosen dan kelompok lain; menutup sesi dengan checklist finalisasi sebelum pengumpulan (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa bekerja dalam kelompok di ruang kelas yang ditata untuk diskusi tim; menggunakan laptop	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan penulisan policy brief (template struktur dan rubrik penilaian) ke LMS UNISAN; membuka forum diskusi asinkron untuk konsultasi draf, di mana tiap kelompok dapat mengunggah draf awal dan menerima komentar dosen maupun rekan (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses template policy brief, rubrik penilaian, dan contoh policy brief pemerintahan daerah di LMS UNISAN; menelusuri data terbaru dari DJPK Kemenkeu, SIPD Kemendagri, dan	Bahan Kajian: - Rekomendasi kebijakan tata kelola daerah; - Evaluasi kinerja pemerintah daerah sebagai basis konteks masalah policy brief; - Tata kelola dan pelayanan publik daerah sebagai fokus rekomendasi; - Fiskal daerah dan sumber pendapatan daerah sebagai dimensi rekomendasi; Pustaka: Aziz & Arnold (2020); Shah (2006); Syafrudin (2006); Rondinelli (1999); Seymour & Turner (2002); Hijri	7

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang argumentatif • Mengembangkan rekomendasi yang inovatif dan kontekstual berdasarkan sintesis temuan dari presentasi kelompok Minggu 13 dan 14, mencerminkan nilai Creativity dan Service ICHSA-N • Mencantumkan pernyataan penggunaan AI Generatif sesuai Pedoman UNISAN apabila digunakan sebagai alat bantu, dan memastikan seluruh analisis substantif merupakan hasil penalaran sendiri (nilai Integrity ICHSA-N)	Partisipasi kelas & laboratorium: Keterlibatan aktif dalam sesi klinik penulisan policy brief di kelas (memberikan dan menerima umpan balik antartim); kesiapan mempresentasikan draf singkat (3-5 menit per kelompok) untuk mendapat masukan sebelum finalisasi; menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik konstruktif (nilai Adaptability ICHSA-N) Tugas: Policy brief kelompok final, minimal 3 halaman maksimal 6	untuk mengakses data dan menyempurnakan draf; mempresentasikan draf menggunakan LCD proyektor pada sesi klinik MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan sesi klinik penulisan (writing clinic): kelompok menyempurnakan policy brief secara iteratif berdasarkan umpan balik lintas kelompok, menerapkan nilai Harmony dalam kolaborasi dan Creativity dalam merumuskan solusi kebijakan yang inovatif dan kontekstual Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Tiap kelompok menyusun policy brief tentang pembenahan tata kelola pemerintahan daerah yang	BPS Gorontalo sebagai basis konteks masalah; menyusun draf policy brief secara kolaboratif menggunakan Google Docs MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kelompok mengembangkan produk policy brief sebagai luaran nyata yang dapat dioperasionalkan oleh pemangku kebijakan pemerintah daerah, mencerminkan semangat technopreneurship berbasis data Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	(2016); Kaho (2010); Republik Indonesia (2014); Republik Indonesia (2019).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			halaman (tidak termasuk daftar pustaka dan lampiran data), memuat empat bagian wajib: ringkasan eksekutif, konteks masalah, opsi kebijakan, dan rekomendasi prioritas; dikumpulkan melalui LMS UNISAN	responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal Gorontalo atau Kawasan Timur Indonesia. Topik policy brief merupakan pengembangan dari topik analisis kebijakan yang dipresentasikan pada Minggu 13 atau 14. Policy brief harus memuat: (1) ringkasan eksekutif (maksimal 150 kata), (2) konteks masalah yang didukung data empiris dari DJPK, SIPD, atau BPS Gorontalo, (3) minimal dua opsi kebijakan dengan analisis kelebihan dan kelemahan masing-masing, (4) rekomendasi prioritas yang argumentatif dan dapat dioperasionalkan. Rekomendasi harus inovatif, kontekstual, dan menunjukkan orientasi Service kepada masyarakat lokal. Apabila menggunakan Generative AI sebagai alat bantu eksplorasi atau penyuntingan bahasa,			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				wajib mencantumkan pernyataan penggunaan AI sesuai Pedoman UNISAN; analisis dan rekomendasi harus merupakan hasil penalaran kelompok sendiri. Deliverable: Policy brief final kelompok (minimal 3 halaman, maksimal 6 halaman tidak termasuk daftar pustaka dan lampiran data, format PDF) diunggah ke LMS UNISAN paling lambat dua hari sebelum Minggu 16; disertai pernyataan penggunaan AI Generatif (jika digunakan) pada halaman terakhir			
16		Mahasiswa mampu: • Menunjukkan penguasaan konsep dan analisis pemerintahan daerah secara komprehensif mencakup seluruh bahan kajian semester	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Ujian Akhir Semester (UAS) sesuai format dan ketentuan yang ditetapkan Program Studi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen atau pengawas ujian memimpin pelaksanaan UAS sesuai tata tertib yang ditetapkan UNISAN; memastikan kondisi ujian yang tertib, adil, dan bebas kecurangan; mengumpulkan lembar	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah informasi teknis pelaksanaan UAS (jadwal, format, cakupan materi, dan tata tertib) ke LMS UNISAN; jika UAS dilaksanakan secara daring, dosen	Bahan Kajian: • Integrasi seluruh bahan kajian semester: konsep dasar pemerintahan daerah, desentralisasi dan dekonsentrasi, landasan filosofis otonomi daerah, kerangka regulasi UU No. 23/2014, struktur	—

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- Mengintegrasikan pemahaman lintas topik (desentralisasi, fiskal daerah, tata kelola, kinerja pemda) dalam menjawab soal atau menyelesaikan tugas akhir sesuai format UAS yang ditetapkan - Menyajikan argumen dan analisis secara jujur, mandiri, dan berbasis bukti sesuai ketentuan integritas akademik UNISAN (nilai Integrity ICHSA-N)	Ilmu Pemerintahan UNISAN; mengukur ketercapaian seluruh Sub-CPMK semester (Sub-CPMK1 hingga Sub-CPMK8) secara integratif; kriteria penilaian mengacu pada rubrik UAS yang diumumkan dosen sebelum pelaksanaan Partisipasi kelas & laboratorium: Kehadiran tepat waktu sesuai jadwal UAS yang ditetapkan; kepatuhan terhadap tata tertib ujian dan etika akademik UNISAN; tidak menggunakan sumber yang	jawaban atau memantau pengumpulan melalui sistem yang ditetapkan (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengerjakan soal UAS secara mandiri di ruang ujian yang telah ditetapkan; menggunakan seluruh bekal konseptual dan analitis yang dibangun sepanjang Minggu 1-15; mematuhi tata tertib ujian sebagai cerminan nilai Integrity ICHSA-N MP — Metode Pembelajaran: Evaluasi sumatif: ujian akhir semester mengukur ketercapaian kompetensi secara integratif atas seluruh capaian pembelajaran mata kuliah Pemerintahan Daerah Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	memastikan akses platform ujian berjalan lancar dan memberikan petunjuk teknis pengerjaan (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses informasi UAS dan panduan teknis di LMS UNISAN; melakukan review mandiri terhadap seluruh materi dan tugas semester (Minggu 1-15) sebagai persiapan; tidak ada pengunggahan materi baru pada minggu ini MP — Metode Pembelajaran: Evaluasi sumatif individual: mahasiswa menyelesaikan UAS secara mandiri sesuai ketentuan Program Studi, menunjukkan kemampuan mengintegrasikan	dan kewenangan, hubungan pusat-daerah, fiskal daerah, tata kelola dan pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, pemerintahan desa, evaluasi kinerja, dan rekomendasi kebijakan; Pustaka: Aziz & Arnold (2020); Rondinelli (1999); Seymour & Turner (2002); Shah (2006); Syafrudin (2006); Hijri (2016); Kaho (2010); Republik Indonesia (2014); Republik Indonesia (2019); Republik Indonesia (2018).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			dilarang selama ujian berlangsung Tugas: Tidak ada tugas tambahan pada minggu UAS; nilai akhir memperhitungkan akumulasi seluruh tugas, partisipasi, dan penilaian yang telah dilakukan sepanjang semester (Minggu 1-15)	Tugas: Tidak ada penugasan baru pada Minggu 16. Mahasiswa mempersiapkan diri untuk UAS dengan melakukan revidi mandiri atas seluruh materi semester, termasuk konsep desentralisasi, kerangka regulasi, struktur kewenangan, fiskal daerah, tata kelola, kinerja pemda, dan rekomendasi kebijakan. Policy brief yang dikumpulkan pada Minggu 15 telah menjadi tugas terakhir semester dan nilainya diintegrasikan ke dalam penilaian akhir. Deliverable: Lembar jawaban UAS (format sesuai ketentuan Program Studi Ilmu Pemerintahan UNISAN) dikumpulkan kepada pengawas atau diunggah ke sistem yang ditetapkan pada akhir sesi ujian	pembelajaran lintas topik pemerintahan daerah Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **PB=** Kegiatan Belajar Terbimbing, **PT=**Kegiatan Penugasan Terstruktur, **KM=**Kegiatan Mandiri, **P=**Praktikum.

3. Komponen Penilaian

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Deskripsi
1	Tugas Analisis Regulasi	20	
2	Kuis Konsep Dasar	15	
3	UTS	25	
4	UAS	25	
5	Policy Brief	15	
	Total Bobot (%)	100	

Rekonsiliasi Bobot Komponen Penilaian dengan Bobot Sub-CPMK

Bobot komponen penilaian pada tabel di atas dan bobot Sub-CPMK merupakan dua cara pandang atas nilai akhir yang sama: penjumlahan menurut baris menghasilkan bobot Sub-CPMK, penjumlahan menurut kolom menghasilkan bobot komponen penilaian.

Sub-CPMK	Tugas Analisis Regulasi	Kuis Konsep Dasar	UTS	UAS	Policy Brief	Bobot Sub-CPMK (%)
Sub-CPMK1	—	8	7	—	—	15
Sub-CPMK2	7	—	6	—	—	13
Sub-CPMK3	7	—	6	—	—	13
Sub-CPMK4	6	—	6	—	—	12
Sub-CPMK5	—	—	—	7	5	12
Sub-CPMK6	—	—	—	6	5	11
Sub-CPMK7	—	7	—	6	—	13
Sub-CPMK8	—	—	—	6	5	11
Bobot Komponen (%)	20	15	25	25	15	100

Nilai Akhir Program Sarjana — Kurikulum 2023

Nilai Akhir	Konversi	
Skala 100	Huruf	Bobot
85.00 – 100.00	A	4.00
75.00 – 84.99	B	3.00
65.00 – 74.99	C	2.00
50.00 – 64.99	D	1.00
0.00 – 49.99	E	0.00

4. Rencana Tugas

Rencana Tugas: Final Project: Analisis Tata Kelola dan Keuangan Pemerintah Daerah di Gorontalo — dari Diagnosis Kelembagaan hingga Policy Brief Rekomendasi

		UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1			
RENCANA TUGAS MAHASISWA					
MATA KULIAH	Pemerintahan Daerah				
KODE	3KKBP214	sks	3	SEMESTER	3
DOSEN PENGAMPU	Dr. Sandi Prahara, S.T., M.Si.				
METODE PENUGASAN					
Project-Based Learning (PjBL) berbasis studi kasus dokumen resmi pemerintah daerah					
JUDUL TUGAS					
Final Project: Analisis Tata Kelola dan Keuangan Pemerintah Daerah di Gorontalo — dari Diagnosis Kelembagaan hingga Policy Brief Rekomendasi					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Sub-CPMK2: Menganalisis perkembangan regulasi dan model otonomi daerah di Indonesia dari era Orde Baru hingga era reformasi, termasuk implikasi perubahan UU pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan lokal.					
Sub-CPMK3: Menganalisis struktur kelembagaan dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan UU No. 23/2014 beserta peraturan turunannya, mencakup urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum.					
Sub-CPMK4: Menganalisis dinamika hubungan fiskal pusat–daerah—meliputi mekanisme transfer Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil—serta mengidentifikasi permasalahan ketimpangan fiskal yang dialami daerah di Kawasan Timur Indonesia.					

Sub-CPMK5: Mengevaluasi kinerja tata kelola dan pelayanan publik pemerintah daerah di lingkungan UNISAN/Gorontalo menggunakan kerangka penilaian berbasis bukti (minimal 3 indikator kinerja terstandar), yang dituangkan dalam laporan evaluasi tertulis.

Sub-CPMK6: Mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah—mencakup penyusunan APBD, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban—melalui analisis dokumen resmi (APBD/LHP BPK) studi kasus satu pemerintah daerah di Gorontalo, dengan mengidentifikasi temuan kritis dan implikasinya terhadap kualitas layanan publik.

Sub-CPMK7: Mempresentasikan hasil analisis kebijakan pemerintahan daerah secara kolaboratif dalam forum diskusi kelas lintas perspektif, dengan menampilkan argumen berbasis data dan merespons sanggahan dari perspektif yang berbeda secara kritis dan konstruktif.

Sub-CPMK8: Merumuskan rekomendasi pembenahan tata kelola pemerintahan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal Gorontalo/Kawasan Timur Indonesia, yang dituangkan dalam policy brief singkat (minimal 3 halaman) dengan struktur: ringkasan eksekutif, konteks masalah, opsi kebijakan, dan rekomendasi prioritas.

DISKRIPSI TUGAS

Kelompok mahasiswa (4–5 orang) memilih satu pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo (provinsi, kabupaten, atau kota) sebagai objek studi, lalu secara sistematis: (1) memetakan struktur kewenangan dan kelembagaannya berdasarkan UU No. 23/2014; (2) mendiagnosis ketimpangan fiskal melalui analisis transfer DAU, DAK, dan DBH dalam dokumen APBD resmi; (3) mengevaluasi kinerja tata kelola dan pelayanan publik menggunakan minimal tiga indikator terstandar; (4) menelaah temuan kritis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pengelolaan keuangan daerah; serta (5) merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dalam format policy brief dan mempresentasikannya secara kolaboratif di forum kelas. Proyek ini mendorong integritas akademik (penggunaan data resmi dan sitasi terverifikasi), kreativitas analitis (sintesis lintas perspektif teoritis), dan kepedulian terhadap kebutuhan nyata masyarakat Kawasan Timur Indonesia.

CAKUPAN UTAMA KERTAS KERJA (Contoh berdasarkan berbagai kasus)

Pemetaan struktur kelembagaan dan pembagian urusan pemerintahan (absolut, konkuren, umum) pemerintah daerah terpilih berdasarkan UU No. 23/2014 beserta peraturan turunannya

Analisis historis regulasi otonomi daerah dari era Orde Baru hingga reformasi dan implikasinya terhadap desain kelembagaan daerah terpilih

Analisis fiskal: perhitungan dan perbandingan proporsi DAU, DAK, dan DBH dalam struktur pendapatan APBD minimal dua tahun anggaran terakhir, disertai identifikasi ketimpangan fiskal horizontal dan vertikal

Evaluasi kinerja tata kelola dan pelayanan publik menggunakan ≥ 3 indikator terstandar (mis. Indeks Pelayanan Publik/IPP, Indeks Inovasi Daerah, dan/atau EKPPD)

Telaah kritis atas ≥ 3 temuan signifikan dalam LHP BPK dan analisis implikasinya terhadap kualitas layanan publik

Policy brief (min. 3 halaman, struktur baku: ringkasan eksekutif, konteks masalah, opsi kebijakan, rekomendasi prioritas) yang responsif terhadap kebutuhan lokal Gorontalo/KTI

Presentasi dan debat kebijakan kolaboratif di forum kelas dengan argumen berbasis data dan respons konstruktif terhadap sanggahan lintas perspektif

LANGKAH Pengerjaan Tugas

Minggu 3–4 | Pembentukan kelompok & penetapan objek studi: Kelompok mendaftar pilihan pemerintah daerah di Gorontalo (tidak boleh duplikasi antara kelompok), menyusun proposal singkat (1 halaman) yang memuat alasan pemilihan, kerangka konseptual awal (desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan), dan daftar sumber data primer yang akan diakses; proposal disetujui dosen sebelum lanjut.

Minggu 5–6 | Pemetaan kelembagaan & regulasi: Kelompok menelaah landasan hukum (UU No. 23/2014 dan peraturan turunan) serta menyusun peta kewenangan urusan pemerintahan daerah terpilih; setiap anggota mengkaji satu perspektif teoritis otonomi daerah (mis. teori desentralisasi fiskal, new public governance, atau perspektif historis regulasi) yang akan diintegrasikan dalam laporan; luaran antara: matriks kewenangan 3-level (pusat–provinsi–kab/kota).

Minggu 7–8 | Analisis fiskal: Kelompok mengunduh dokumen APBD resmi dan data transfer fiskal dari DJPK Kemenkeu untuk minimal dua tahun anggaran terakhir; menghitung proporsi DAU/DAK/DBH terhadap total pendapatan daerah; membandingkan kapasitas fiskal daerah terpilih dengan rata-rata KTI; luaran antara: tabel analisis fiskal dan narasi identifikasi ketimpangan (dikumpulkan sebagai laporan antara I sebelum UTS).

Minggu 9 | UTS — mencakup Sub-CPMK1 s.d. Sub-CPMK4 (individual, terpisah dari proyek).

Minggu 10–11 | Evaluasi kinerja tata kelola & pelayanan publik: Kelompok mengumpulkan data ≥ 3 indikator kinerja terstandar (mis. IPP dari Ombudsman, EKPPD Kemendagri, Indeks Inovasi Daerah); menyusun kerangka penilaian berbasis bukti; mengidentifikasi gap antara standar dan kondisi aktual; luaran antara: tabel skoring kinerja beserta narasi analisis.

Minggu 12–13 Telaah LHP BPK & pengelolaan keuangan daerah: Kelompok mengunduh LHP BPK atas LKPD daerah terpilih (tersedia di portal BPK); mengidentifikasi ≥3 temuan signifikan (mis. ketidaksesuaian penggunaan anggaran, kelemahan SPI, ketidakpatuhan); menganalisis dampak temuan terhadap kualitas layanan publik; luaran antara: matriks temuan kritis BPK (dikumpulkan sebagai laporan antara II). Minggu 14 Penyusunan laporan komprehensif & policy brief: Kelompok mengintegrasikan seluruh analisis (kelembagaan, fiskal, kinerja, keuangan) ke dalam laporan komprehensif (≥20 halaman, tidak termasuk lampiran); menyusun policy brief (min. 3 halaman, struktur baku); nilai ICHSA-N Integrity dan Service diwujudkan melalui kejujuran data dan orientasi rekomendasi pada kepentingan masyarakat lokal. Minggu 15 Presentasi & debat kebijakan: Setiap kelompok mempresentasikan temuan dan policy brief (15 menit presentasi + 10 menit tanya-jawab dan sanggahan lintas perspektif dari kelompok lain dan dosen); setiap anggota wajib merespons minimal satu sanggahan secara kritis dan konstruktif; sesi ini dinilai secara individual untuk komponen presentasi. Minggu 16 UAS — integrasi konseptual final (individual, terpisah dari proyek); pengumpulan dokumen final proyek (laporan + policy brief + slide) paling lambat hari UAS.	
BENTUK DAN FORMAT LUARAN	
a. Proposal singkat (1 hal., Mg 4); 2) Laporan Antara I — matriks kewenangan + analisis fiskal (Mg 8, sebelum UTS); 3) Laporan Antara II — scoring kinerja + matriks temuan BPK (Mg 13); 4) Laporan Komprehensif Final (≥20 hal. isi + lampiran dokumen resmi yang dikutip, format PDF); 5) Policy Brief (min. 3 hal., struktur baku: ringkasan eksekutif, konteks masalah, opsi kebijakan, rekomendasi prioritas, format PDF); 6) Slide presentasi (format PPTX/PDF, maks. 20 slide); 7) Rekaman/dokumentasi sesi presentasi dan debat.	
INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN	
a. Pemetaan Kelembagaan & Analisis Regulasi (bobot 15%). Dinilai berdasarkan keakuratan matriks pembagian urusan pemerintahan (absolut, konkuren, umum) mengacu UU No. 23/2014, kedalaman perbandingan regulasi lintas era (Orde Baru–reformasi), dan ketepatan penggunaan minimal 3 perspektif teoritis otonomi daerah yang dikaitkan dengan kondisi faktual daerah terpilih. b. Analisis Fiskal (DAU/DAK/DBH & Ketimpangan) (bobot 20%). Dinilai berdasarkan kebenaran perhitungan proporsi komponen transfer fiskal dari dokumen APBD resmi minimal dua tahun anggaran, kejelasan identifikasi pola ketimpangan fiskal horizontal/vertikal, dan kecukupan perbandingan dengan konteks KTI yang didukung data kuantitatif dari sumber resmi (DJPK/BPS). c. Evaluasi Kinerja Tata Kelola & Pelayanan Publik (bobot 20%). Dinilai berdasarkan kesesuaian pemilihan ≥3 indikator kinerja terstandar, keakuratan scoring berbasis bukti dokumen resmi (IPP, EKPPD, atau setara), ketajaman analisis gap antara standar dan kondisi aktual, serta kejelasan implikasi temuan terhadap kualitas layanan publik di daerah terpilih. d. Telaah Kritis LHP BPK & Pengelolaan Keuangan Daerah (bobot 20%). Dinilai berdasarkan ketepatan identifikasi ≥3 temuan signifikan dalam LHP BPK (mencakup aspek SPI dan kepatuhan), kedalaman analisis kausalitas antara kelemahan pengelolaan keuangan dan kualitas layanan publik, serta kemampuan mengaitkan temuan dengan siklus APBD (perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban). e. Policy Brief (bobot 15%). Dinilai berdasarkan kelengkapan struktur baku (ringkasan eksekutif, konteks masalah, opsi kebijakan, rekomendasi prioritas), ketajaman dan keberpihakannya pada kebutuhan masyarakat lokal Gorontalo/KTI, kejelasan opsi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan daerah, serta penggunaan sitasi data resmi yang terverifikasi. f. Presentasi, Debat, & Respons Sanggahan (individual) (bobot 10%). Dinilai secara individual berdasarkan kejelasan dan ketepatan penyampaian argumen berbasis data selama presentasi, kualitas respons terhadap minimal satu sanggahan dari kelompok lain (kritis, konstruktif, tidak defensif), dan kemampuan mempertahankan posisi atau mengakui kelemahan argumen secara akademik.	
JADWAL PELAKSANAAN	
Mg 3–4: Pembentukan kelompok, pemilihan daerah studi, penyusunan dan persetujuan proposal singkat Mg 5–6: Pemetaan struktur kelembagaan, telaah regulasi lintas era, penyusunan matriks kewenangan Mg 7–8: Analisis fiskal (DAU/DAK/DBH, APBD ≥2 tahun), identifikasi ketimpangan fiskal KTI → Laporan Antara I dikumpulkan akhir Mg 8 Mg 9: UTS (individual, cakupan Sub-CPMK1–4) Mg 10–11: Evaluasi kinerja tata kelola menggunakan ≥3 indikator terstandar, analisis gap pelayanan publik	

Mg 12–13: Telaah LHP BPK, analisis pengelolaan keuangan daerah → Laporan Antara II dikumpulkan akhir Mg 13 Mg 14: Integrasi seluruh analisis ke Laporan Komprehensif Final dan penyusunan Policy Brief Mg 15: Presentasi & debat kebijakan forum kelas (semua kelompok) Mg 16: UAS (individual) + batas akhir pengumpulan dokumen final (laporan, policy brief, slide) via LMS	
LAIN-LAIN	
Proyek dikerjakan secara kelompok (4–5 mahasiswa, dibentuk paling lambat Minggu 3 dan didaftarkan ke dosen); setiap kelompok wajib memilih pemerintah daerah yang berbeda (tidak boleh duplikasi) yang disahkan melalui persetujuan proposal; kontribusi individual dinilai melalui: (a) log kontribusi yang ditandatangani seluruh anggota dan dilampirkan dalam laporan final, (b) nilai presentasi dan respons sanggahan yang diberikan secara individual (bobot 10%), dan (c) hak dosen untuk melakukan verifikasi lisan kepada anggota mana pun pada sesi presentasi; seluruh data yang digunakan harus berasal dari dokumen resmi yang dapat diverifikasi (APBD, LHP BPK, laporan kementerian) sebagai wujud nilai ICHSA-N Integrity — penggunaan data tidak terverifikasi atau fabrikasi data mengakibatkan diskualifikasi komponen terkait; keterlambatan pengumpulan laporan antara dikenai pengurangan 10 poin per hari kerja, sedangkan keterlambatan laporan final (melewati hari UAS) dikenai pengurangan 15 poin per hari kerja tanpa toleransi kecuali atas izin tertulis dosen; mahasiswa didorong memilih daerah dengan isu tata kelola yang relevan bagi masyarakat Gorontalo dan Kawasan Timur Indonesia sebagai wujud nilai ICHSA-N Service dan Nationalism dalam konteks akademik.	
DAFTAR RUJUKAN	
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan turunannya. Badan Pemeriksa Keuangan RI. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo (tahun relevan). Tersedia di: https://www.bpk.go.id Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI. Data Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Tersedia di: https://www.djpk.kemenkeu.go.id Kementerian Dalam Negeri RI. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Tersedia di: https://www.kemendagri.go.id Ombudsman Republik Indonesia. Laporan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional (tahun relevan). Tersedia di: https://www.ombudsman.go.id	

5.1 Tugas Analisis Kasus — Tugas Analisis Regulasi

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Tugas Analisis Regulasi			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Keaktifan	Aktif & relevan sepanjang diskusi	Cukup aktif	Jarang	Pasif
2	Kualitas kontribusi	Ide bernas & menambah wawasan	Ide baik	Ide umum	Tidak berbobot
3	Menghargai pendapat	Menyimak & menanggapi santun	Menghargai	Kadang memotong	Mendominasi/abai
4	Tanggung jawab tugas	Selalu siap & tepat waktu	Umumnya siap	Sering terlambat	Lalai
5	Etika & sikap	Sopan, jujur, kolaboratif	Baik	Kurang	Buruk

5.2 Kuis Konsep — Kuis Konsep Dasar (Holistik)

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Kuis Konsep Dasar			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami

5.3 UTS (Holistik)

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		UTS			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami

5.4 UAS (Holistik)

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		UAS			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)

5.5 Policy Brief

Nama Mahasiswa		NIM	
Judul Tugas		Policy Brief	
No	Kriteria	Skor Penilaian	
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)
		Cukup (60-69)	Kurang (<60)

6. Norma Akademik

1. Kehadiran minimal 75% dari total pertemuan menjadi syarat mengikuti UAS.
2. Toleransi keterlambatan masuk kelas 15 menit; lewat itu dianggap tidak hadir pada sesi tsb kecuali ada izin dosen.
3. Tugas dikumpulkan via LMS sesuai tenggat yang ditetapkan; keterlambatan dikenakan pengurangan nilai sesuai kebijakan dosen pengampu.
4. Integritas akademik ditegakkan penuh -- plagiarisme, joki, atau pemalsuan data/karya dikenakan sanksi akademik sesuai Pedoman Akademik UNISAN.
5. Pemanfaatan Generative AI (GenAI) wajib disitasi sesuai format yang ditetapkan; dilarang dipakai saat UTS/UAS/kuis kecuali diizinkan eksplisit oleh dosen.
6. Gawai (ponsel/laptop) disenyapkan selama perkuliahan, dipakai hanya untuk keperluan pembelajaran atas izin dosen.
7. Kerahasiaan data narasumber/subjek penelitian dijaga sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
8. Komunikasi dosen-mahasiswa dilakukan melalui kanal resmi (LMS/email institusi), bukan kanal pribadi.